

**PENGARUH MEKANISME *GOOD
CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
PROFITABILITAS PERUSAHAAN**

**(STUDI PADA PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG
TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2014-2016)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Fakultas Ilmu Administrasi pada Universitas Brawijaya**

**REYNALDI SAGITA PRATAMA
NIM.145030201111009**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI KEUANGAN
MALANG
2018**

**PENGARUH MEKANISME *GOOD
CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
PROFITABILITAS PERUSAHAAN**

**(STUDI PADA PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG
TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2014-2016)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Fakultas Ilmu Administrasi pada Universitas Brawijaya**

**REYNALDI SAGITA PRATAMA
NIM.145030201111009**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI KEUANGAN
MALANG
2018**

MOTTO

“Many of life’s failures are experienced by people who did not realize how close they were to success when they gave up.”

-Thomas A. Edison-

“sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.”

(QS. Al Insyurah 6-8)

“Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan, dan tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan.”

-Penulis-

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Profitabilitas Perusahaan” (Studi pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdapat di BEI tahun 2014-2016)

Disusun oleh : Reynaldi Sagita Pratama

NIM : 145030201111009

Fakultas : Ilmu Administrasi

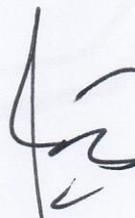
Program Studi : Ilmu Administrasi Bisnis

Konsentrasi/Minat : Keuangan

Malang, 29 November 2018

Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si.
NIP 19750305 200604 2 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 17 Desember 2018

Jam : 12.00

Skripsi atas nama: Reynaldi Sagita Pratama

Judul : Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Perusahaan
(Studi pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di BEI Periode 2014- 2016)

dan dinyatakan

LULUS

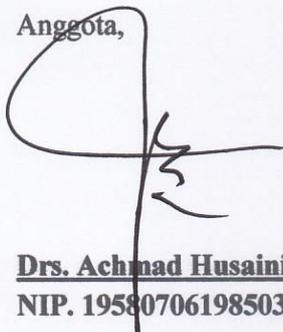
MAJELIS PENGUJI

Ketua



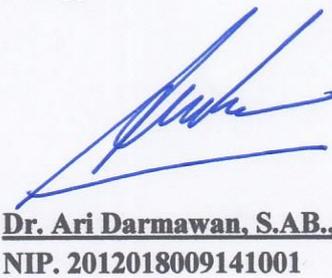
Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si
NIP. 197503052006042001

Anggota,



Dr. Achmad Husaini, M.AB
NIP. 195807061985031004

Anggota,



Dr. Ari Darmawan, S.AB., M.AB
NIP. 2012018009141001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam makalah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini terbukti terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 28 September 2018



ReynaldiSagitaPratama
NIM. 145030201111009

RINGKASAN

Reynaldi Sagita Pratama, 2018. **Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang terdapat di BEI tahun 2014-2016)**, Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si. 138 halaman + xvi

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap rasio Profitabilitas (Studi pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang terdapat di BEI tahun 2014-2016). Variabel Independen dalam penelitian ini yaitu Tata kelola Perusahaan yang diukur oleh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Profitabilitas yang diukur oleh *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian eksplanasi atau *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 12 sampel berdasarkan metode sampling jenuh, dengan jumlah pengamatan sebesar 36. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Linear Berganda.

Hasil penelitian ini adalah berdasarkan uji F menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). Hasil penelitian berdasarkan Uji t menunjukkan jumlah dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE), sedangkan kepemilikan institusional dan komisaris independen secara parsial menunjukkan adanya pengaruh signifikan kepemilikan institusional dan komisaris independen terhadap *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE).

Kata Kunci : *Good Corporate Governance*, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE).

SUMMARY

Reynaldi Sagita Pratama, 2018 , **The Influence Mechanism Of Good Corporate Governance Toward of Profitability (Studies in State-Owner Enterprises Company In IDX in 2014-2016)**, Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si. 138 page + xvi

This study aimed to examine the effect of Good Corporate Governance toward the ratio of Profitability (Studies in State-Owner Enterprises Company In IDX in 2014-2016). Independent variables in this study i.e Good Corporate Governance as measured by the Board of Institutional Ownership, Independent Commissioner, Board of Directors and Audit Committee. Dependent variables in this study is Profitability as measured by Return On Asset (ROA) and Return On Equity (ROE). This study included into empirical research or explanatory research with quantitative approach. The number of samples in this study is 12 samples based on saturation sampling method, with the influences of 36. Data analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis.

The result of this study are based on F test showed that the variables of the Institutional Ownership, Independent Commissioner, Board of Directors and Audit Committee have a significant effect altogether to Return On Asset (ROA) and Return On Equity (ROE). The result based on t test showed the Board of Director and Audit Committee does not have a significant effect partially to Return On Asset (ROA) and Return On Equity (ROE). Whereas the result of Institutional Ownership, Independent Commissioner partially showed significant effect of Independent Commissioner on the Return On Asset (ROA) and Return On Equity (ROE).

Keywords : Good Corporate Governance, the Board of Institutional Ownership, Independent Commissioner, Board of Directors and Audit Committee, Return On Asset (ROA) and Return On Equity (ROE)

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala berkah limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan Dan *Good Corporate Governance* Terhadap Terjadinya *Financial Distress* (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014- 2016)” dengan baik dan tepat waktu. Penelitian skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bekal ilmu pengetahuan, dorongan dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, peneliti tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan anugerah yang tak terhingga kepada peneliti.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieq, MBA. selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis.
4. Ibu Nila Firdausi Nuzula, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Bisnis.

5. Bapak Dr. Ari Darmawan, S.AB, M.AB selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis.
6. Ibu Dr. Saparila Worokinasih S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu yang telah Ibu berikan selama ini.
7. Pihak pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang sebagai tempat peneliti untuk melaksanakan penelitiannya.
8. Bapak dan Ibu tercinta yang telah banyak memberi dukungan serta do'a kepada peneliti agar cepat bisa menyelesaikan studinya.
9. Keluarga besar yang tak terkecuali yang telah mendoakan dan memberikan semangat kepada peneliti.
10. Teman-teman Bimbingan Bu Saparila dan teman-teman magang yang telah menemani dan membantu peneliti dalam proses pengerjaan skripsi.
11. Layla yang telah memberikan dukungan serta semangat tanpa henti dalam menyelesaikan skripsi.
12. Sahabatku tercinta Anis, Vira, Sisca, Nanta, Fira yang selalu mendukung dan merepoti penulis yang terkadang pula memotivasi dalam berbagai hal.
13. Seluruh teman-teman program studi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan saran serta dukungan sehingga penulisan penelitian ini dapat terselesaikan.
14. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan penelitian ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa semaksimal apapun usaha yang telah dilakukan untuk menyusun penelitian skripsi ini, tetap ada kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kedepannya yang lebih baik. Semoga penelitian skripsi ini bermanfaat bagi peneliti selanjutnya terutama untuk mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, dan masyarakat luas pada umumnya

Malang, 29 November 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-------------|
| MOTO | ii |
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| TANDA PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI | v |
| RINGKASAN | vi |
| SUMMARY | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Kontribusi Penelitian..... | 11 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 12 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 14 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 14 |
| B. Landasan Teoritis..... | 20 |
| 1. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)..... | 20 |
| a. Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)..... | 20 |
| b. Definisi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)..... | 22 |
| c. Tujuan dan Manfaat <i>Good Corporate Governance</i> | 24 |
| d. Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> | 25 |
| e. Pihak-Pihak Terkait dalam Pelaksanaan Pedoman Perusahaan..... | 27 |
| f. Tahap-Tahap Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> | 30 |
| g. Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> | 33 |
| 2. Profitabilitas..... | 41 |
| 3. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan Komite Audit Terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA) dan <i>Return On Equity</i> (ROE)..... | 45 |
| a. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Profitabilitas | 46 |
| b. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Profitabilitas | 46 |

| | |
|---|-----------|
| c. Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Profitabilitas | 48 |
| d. Pengaruh Komite Audit Terhadap Profitabilitas | 48 |
| 4. Model Konsep dan Hipotesis..... | 49 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 52 |
| A. Jenis Penelitian..... | 52 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 52 |
| C. Populasi dan Sampel Penelitian..... | 53 |
| D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel..... | 55 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 59 |
| F. Metode Analisis Data..... | 59 |
| 1. Analisis Statistik Deskriptif | 59 |
| 2. Uji Asumsi Klasik | 60 |
| 3. Analisis Regresi Linear Berganda | 63 |
| 4. Pengujian Hipotesis | 65 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 69 |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian..... | 69 |
| 1. Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia..... | 69 |
| 2. Gambaran Umum Sampel Penelitian..... | 70 |
| B. Analisis Statistik Deskriptif | 80 |
| 1. Kepemilikan Institusional..... | 81 |
| 2. Dewan Komisaris Independen..... | 82 |
| 3. Dewan Direksi..... | 84 |
| 4. Komite Audit..... | 86 |
| 5. <i>Return On Asset (ROA)</i> | 87 |
| 6. <i>Return On Equity (ROE)</i> | 89 |
| C. Hasil Uji Asumsi Klasik..... | 91 |
| 1. Uji Normalitas..... | 91 |
| 2. Uji Multikolinieritas..... | 95 |
| 3. Uji Heteroskedastisitas..... | 96 |
| 4. Uji Autokorelasi..... | 98 |
| D. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda..... | 99 |
| E. Hasil Pengujian Hipotesis..... | 103 |
| 1. Uji Hipotesis 1..... | 104 |
| a. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap ROA..... | 104 |
| b. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap ROA..... | 105 |
| c. Pengaruh Dewan Direksi terhadap ROA..... | 105 |
| d. Pengaruh Komite Audit terhadap ROA..... | 106 |

| | | |
|----------------------------|--|------------|
| 2. | Uji Hipotesis 2..... | 107 |
| a. | Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap ROA..... | 107 |
| b. | Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap ROA..... | 108 |
| c. | Pengaruh Dewan Direksi terhadap ROA..... | 109 |
| d. | Pengaruh Komite Audit terhadap ROA..... | 109 |
| 3. | Uji Hipotesis R ² | 110 |
| F. | Pembahasan Hasil Penelitian..... | 112 |
| 1. | Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap ROA..... | 113 |
| 2. | Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap ROA..... | 114 |
| 3. | Pengaruh Dewan Direksi terhadap ROA..... | 116 |
| 4. | Pengaruh Komite Audit terhadap ROA..... | 117 |
| 5. | Pengaruh kepemilikan Institusional, dewan komisaris Independen, dewan direksi dan komite audit secara simultan terhadap ROA..... | 118 |
| 6. | Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap ROE..... | 121 |
| 7. | Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap ROE..... | 122 |
| 8. | Pengaruh Dewan Direksi terhadap ROE..... | 124 |
| 9. | Pengaruh Komite Audit terhadap ROE..... | 125 |
| 10. | Pengaruh kepemilikan Institusional, dewan komisaris Independen, dewan direksi dan komite audit secara simultan terhadap ROE..... | 127 |
| BAB V PENUTUP..... | | 129 |
| A. | Kesimpulan..... | 129 |
| B. | Saran..... | 133 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 136 |

DAFTAR TABEL

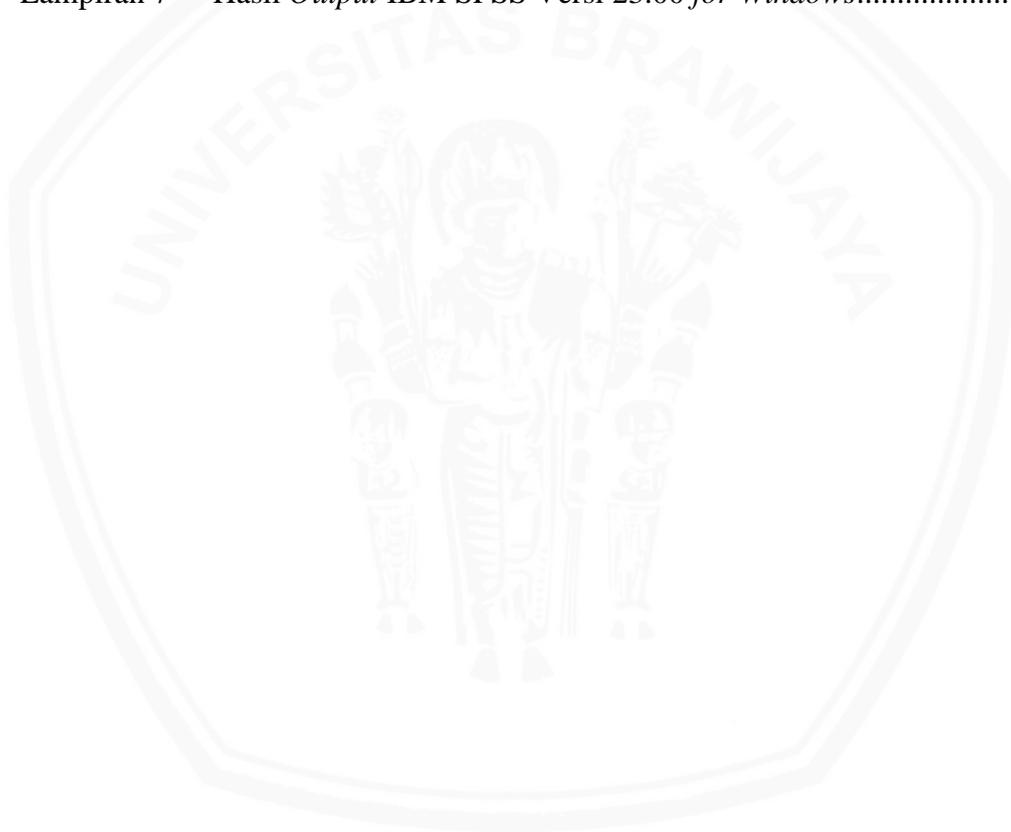
| Tabel | Judul | Halaman |
|--------------|--|----------------|
| Tabel 1 | Mapping Variabel, Hasil Penelitian, Persamaan, dan Perbedaan Penelitian Terdahulu..... | 19 |
| Tabel 2 | Kriteria Pemilihan Sampel | 54 |
| Tabel 3 | Daftar Perusahaan BUMN Yang Menjadi Sampel Penelitian Tahun 2014-2016..... | 71 |
| Tabel 4 | Kepemilikan Instusional Perusahaan Sampel Tahun 2014-2016..... | 81 |
| Tabel 5 | Proporsi Dewan Komisaris Independen Perusahaan Sampel Tahun 2014-2016..... | 83 |
| Tabel 6 | Jumlah Dewan Direksi Perusahaan Sampel Tahun 2014-2016..... | 85 |
| Tabel 7 | Jumlah Komite Audit Perusahaan Sampel Tahun 2014-2016..... | 86 |
| Tabel 8 | Nilai ROA Perusahaan Sampel Tahun 2014-2016 | 88 |
| Tabel 9 | Nilai ROE Perusahaan Sampel Tahun 2014-2016..... | 89 |
| Tabel 10 | Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov | 94 |
| Tabel 11 | Uji Multikolinieritas Model 1 | 85 |
| Tabel 12 | Uji Multikolinieritas Model 2 | 96 |
| Tabel 13 | Uji Autokolerasi Model 1 | 98 |
| Tabel 14 | Uji Autokolerasi Model 2 | 99 |
| Tabel 15 | Analisis Regresi Linear Berganda Model 1 | 100 |
| Tabel 16 | Analisis Regresi Linear Berganda Model 2 | 102 |
| Tabel 17 | Uji t Statistik Model 1 | 104 |
| Tabel 18 | Uji F Statistik Model 1..... | 106 |
| Tabel 19 | Uji t Statistik Model 2 | 107 |
| Tabel 20 | Uji F Statistik Model 2..... | 110 |
| Tabel 21 | Model Summary Model 1 | 111 |
| Tabel 22 | Model Summary Model 2 | 111 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Judul | Halaman |
|---------------|---|----------------|
| Gambar 1 | Model Konsep | 49 |
| Gambar 2 | Model Hipotesis | 50 |
| Gambar 3 | Uji Normalitas (Histogram) Model 1 | 92 |
| Gambar 4 | Uji Normalitas (Histogram) Model 2 | 92 |
| Gambar 5 | Uji Normalitas (<i>Normal P-Plot of Regression Standardized Residual</i>) Model 1 | 93 |
| Gambar 6 | Uji Normalitas (<i>Normal P-Plot of Regression Standardized Residual</i>) Model 2 | 93 |
| Gambar 7 | Uji Heteroskedastisitas (<i>Scatterplot</i>) Model 1 | 97 |
| Gambar 8 | Uji Heteroskedastisitas (<i>Scatterplot</i>) Model 2 | 97 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Judul | Halaman |
|------------|--|---------|
| Lampiran 1 | Komposisi Kepemilikan Institusional Perusahaan Sampel Tahun 2014-2016 (%)..... | 139 |
| Lampiran 2 | Proporsi Dewan Komisaris Independen Perusahaan Sampel Tahun 2014-2016 (%)..... | 141 |
| Lampiran 3 | Jumlah Dewan Direksi Perusahaan Sampel Tahun 2014-2016 .. | 143 |
| Lampiran 4 | Jumlah Komite Audit Perusahaan Sampel Tahun 2014-2016 | 145 |
| Lampiran 5 | Data <i>Input</i> IBM SPSS Versi 23.00 <i>for Windows</i> | 138 |
| Lampiran 6 | Standarisasi Data <i>Input</i> IBM SPSS Versi 23.00 <i>for Windows</i> | 139 |
| Lampiran 7 | Hasil <i>Output</i> IBM SPSS Versi 23.00 <i>for Windows</i> | 140 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kinerja dari perusahaan menjadi ukuran keberhasilan atas pelaksanaan fungsi - fungsi keuangan pada perusahaan. Perusahaan dapat dikatakan baik bila kinerja perusahaan yang baik diawali dengan adanya kepercayaan dari investor terhadap suatu perusahaan bahwa dana yang mereka investasikan dalam kondisi yang aman dan diharapkan akan memberikan *return* yang baik pula dan sesuai tujuan perusahaan yang ingin dicapai. Martono dan Harjinto (2005:02) berpendapat bahwa perusahaan didirikan karena memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk mencapai keuntungan maksimal, ingin memakmurkan pemilik perusahaan atau para pemegang saham, memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan perusahaan ini yang menjadikan dasar bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan serta pengelolaan yang sesuai bagi perusahaan.

Pengelolaan perusahaan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Pemilik perusahaan akan berupaya untuk mencapai tujuan perusahaan. Pada kondisi seperti ini maka tugas manajemen akan menjadi lebih berat, dimana keberhasilan perusahaan sangat bergantung dan dipengaruhi oleh kebijakan yang ditetapkan perusahaan terutama dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal dengan sebutan *Good Corporate Governance (GCG)*

Istilah *Good Corporate Governance* sudah tidak asing dalam manajemen korporasi. Awal pengenalan konsep GCG di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *international monetary fund (IMF)* dalam menghadapi *economy recovery* paska krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Lamanya proses pemulihan ekonomi di Indonesia disebabkan oleh lemahnya *good corporate governance* yang diterapkan perusahaan di Indonesia. Setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998, pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam penerapan *good corporate governance*.

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dalam Bukhori dan Raharja (2012:1) mendefinisikan “konsep *Corporate Governance* sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*)”. Menurut Munjono (2005) dalam Akadun (2007:145) menjelaskan bahwa “GCG merupakan sistem untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*”. Pada dasarnya *Good Corporate Governance* adalah suatu proses yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan perusahaannya dengan memperhatikan kepentingan para *stakeholders* sehingga mencapai tujuan perusahaan secara efisien.

Tujuan penerapan GCG dalam perusahaan adalah meningkatkan nilai tambah perusahaan untuk semua pihak-pihak yang berkepentingan dan berkesinambungan dalam jangka panjang melalui peningkatan kinerja perusahaan. Selain itu,

penerapan GCG juga bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran bagi pemilik atau pemegang saham perusahaan sehingga mendorong manager untuk bekerja lebih baik dalam memaksimalkan kinerja perusahaan. Harapan dikeluarkannya peraturan mengenai GCG pada perusahaan adalah agar berdampak positif pada kinerja keuangan dan control pada perusahaan di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan GCG dibutuhkan mekanisme yang tersistem untuk memantau semua kebijakan yang diterapkan.

“Mekanisme *corporate governance* adalah syarat-syarat pelaksanaan sistem dalam suatu badan usaha dimana berbagai pihak yang berkepentingan terhadap badan usaha tersebut dapat memastikan bahwa pihak manager dan pihak badan usaha lainnya dapat memenuhi kepentingan *stakeholder*” (Sanda, 2005 dalam Puspitasari dan Ernawati, 2010:193) terdapat dua mekanisme GCG, yaitu mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal meliputi pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manager, karyawan dan komite audit. Sedangkan mekanisme eksternal meliputi pengaruh pasar dan sistem hukum untuk mengendalikan perusahaan. Penelitian ini lebih mengkaji mekanisme kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi dan komite audit.

Struktur kepemilikan perusahaan yang salah satunya adalah kepemilikan institusional akan dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan “konsentrasi kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain” (Tarjo, 2008 dalam Hisammuddin dan Tirta, 2012:120). Institusi memegang saham mayoritas karena sumberdaya yang dimiliki lebih besar jika

dibandingkan dengan pemegang saham lainnya sehingga pihak institusional dapat melakukan pengawasan lebih kuat. Pada umumnya, pemilik institusional akan lebih memilih untuk berinvestasi pada perusahaan yang menerapkan kontrol kuat dengan deviden yang tinggi karena kepemilikan yang tinggi mengharapkan *return* yang tinggi pula, dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer serta dapat meminimalisir tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan.

Dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan juga memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi, dan pemegang saham pengendali ataupun hubungan lain yang akan mempengaruhi kemampuan bertindak secara independen. “dalam suatu perseroan, diwajibkan memiliki sekurang kurangnya satu orang komisaris independen berasal dari luar perusahaan serta tidak memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya” (Sutedi, 2012:148).

Dewan direksi merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan. Pengangkatan dan pemberhentian dewan direksi dilakukan oleh rapat umum pemegang saham. Dewan direksi bertanggung jawab menetapkan kebijakan, strategi serta prosedur pengendalian internal, melaksanakan kebijakan serta strategi yang disetujui dewan komisaris, memelihara struktur organisasi dan memastikan pembagian wewenang berjalan secara efektif. Sesuai

dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 33/POJK.04/2014, Dewan Direksi dalam suatu perusahaan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi.

Komite Audit adalah pihak yang memiliki tanggungjawab untuk mengawasi laporan keuangan, audit eksternal, dan sistem pengendalian internal. Tujuan dari Komite Audit adalah memastikan manajemen bekerja sesuai kepentingan para *shareholder* dan *stakeholders*. Adanya Komite Audit ini akan meningkatkan kontrol terhadap kinerja keuangan dan laporan keuangan terawasi. Berdasarkan keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-29/PM/2004 menyatakan bahwa Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang dari luar perusahaan.

Salah satu tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk menghasilkan laba (*profit*). Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba pada suatu periode tertentu. Profitabilitas memiliki arti penting bagi perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup dalam jangka panjang dan untuk evaluasi atas efektifitas pengelolaan perusahaan. Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi perusahaan, sehingga dibutuhkan alat analisis untuk menilainya yaitu dengan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, serta modal saham tertentu (Hanafi, 2013:42). Rasio profitabilitas yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE).

Berbagai rasio keuangan yang ada, peneliti menggunakan *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). ROA atau *Return On Assets* merupakan

tingkat pertumbuhan terhadap total aset, yaitu suatu rasio profitabilitas untuk mengetahui berapa laba yang dihasilkan dari total aktiva yang digunakan oleh perusahaan. *Return On Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan dari modal sendiri maupun modal asing. ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total *assets*. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik karena tingkat pengembalian (*return*) semakin besar. Semakin tinggi rasio maka dapat dikatakan semakin baik dan efisien perusahaan dalam mengelola aktiva atau aset yang dimilikinya. Alasan penggunaan ROA dalam penelitian ini karena dengan ROA, investor dapat melihat bagaimana perusahaan mengoptimalkan penggunaan asetnya secara efisien untuk memaksimalkan laba yang juga menjadi tujuan GCG. ROE atau *Return On Equity* merupakan rasio keuangan yang dapat menunjukkan besarnya laba bersih yang diperoleh dari ekuitas yang dimiliki perusahaan. Sedangkan *equity* merupakan modal yang dimiliki perusahaan sendiri, bukan dari pinjaman. Jadi, pada dasarnya rasio ini menunjukkan seberapa besar laba yang diperoleh dari modal sendiri. ROE menunjukkan besarnya pendapatan bersih yang diperoleh perusahaan dari *equity* yang dimilikinya. Semakin besar nilai rasionya, maka semakin besar dana yang dapat dikembalikan dari ekuitas menjadi laba. Artinya semakin besar laba bersih yang diperoleh dari modal sendiri. ROE tinggi akan menyebabkan posisi pemilik modal perusahaan semakin kuat. *Return On Equity* yang baik dan biaya modal yang rendah akan mempengaruhi kemudahan perusahaan untuk memperoleh pinjaman,

mempengaruhi keputusan investor dalam menanamkan modalnya dan bagi masa depan perusahaan.

Penelitian mengenai mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap profitabilitas perusahaan telah banyak dilakukan, tetapi hasil yang diperoleh masih belum konsisten. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hisamuddin dan Tirta (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit berpengaruh terhadap ROA dan ROE. Hasil lain ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan Arifani (2013) menunjukkan bahwa komite audit, kepemilikan institusional, komisaris independen berpengaruh terhadap ROE. Penelitian Purno (2013) menunjukkan kepemilikan institusional dewan direksi berpengaruh terhadap ROA namun dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Oemar (2014) hanya kepemilikan institusional dan ukuran dewan direksi yang berpengaruh terhadap ROE. Penelitian tertius dan kristiawan (2015) menyatakan kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap ROA

Perusahaan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. Pemilihan perusahaan BUMN sebagai populasi penelitian karena BUMN merupakan kelompok perusahaan yang dijadikan percontohan penerapan kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya penerapan *Good Corporate Governance*. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satu yang dilakukan BUMN untuk mewujudkan perannya adalah dengan privatisasi. Dengan

privatisasi ini, maka kepemilikan BUMN tidak seratus persen milik pemerintah, tetapi sebagian telah dimiliki oleh pihak lain seperti institusi, manajemen, publik, maupun asing. Struktur kepemilikan seperti ini, diharapkan BUMN dapat menjalankan peran secara efektif dan meningkatkan kinerjanya (Hanifah, 2011:291). Selain itu, pembentukan dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit diharapkan memberikan kontribusi dalam mengawasi jalannya kegiatan perusahaan BUMN.

Fenomena yang terjadi saat ini, laba BUMN tidak menyumbang nilai yang signifikan bagi pendapatan negara. Persentase laba BUMN terhadap pendapatan negara dalam kisaran 10,1 % atau Rp206 Triliun dari target Rp244 Triliun (www.kemenkeu.go.id). Pada tahun 2016, tercatat sebanyak 118 perusahaan BUMN, 20 diantaranya adalah perusahaan BUMN yang *go public* terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Total pendapatan 118 perusahaan BUMN pada tahun 2016 mencapai Rp2.235 Triliun, naik 29,3% dari tahun sebelumnya Rp1.728 Triliun. Laba bersih diperkirakan mencapai Rp166 Triliun, naik 10,6% dari tahun sebelumnya Rp150 Triliun. Akan tetapi terdapat 26 perusahaan BUMN yang mengalami kerugian pada tahun 2016 dengan perkiraan total defisit Rp3,4 Triliun (www.bumn.go.id). Fakta tersebut menunjukkan bahwa kinerja BUMN kurang optimal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, judul penelitian yang diambil oleh penelitian adalah **“Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Perusahaan” (Studi pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang terdapat di BEI tahun 2014-2016)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)*?
2. Apakah kepemilikan dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)*?
3. Apakah kepemilikan dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)*?
4. Apakah kepemilikan komite audit berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)*?
5. Apakah kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)*?
6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity (ROE)*?
7. Apakah kepemilikan dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity (ROE)*?
8. Apakah kepemilikan dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity (ROE)*?
9. Apakah kepemilikan komite audit berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity (ROE)*?

10. Apakah kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah memberi jawaban atas masalah yang dirumuskan sebelumnya, yaitu:

1. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).
2. Mengetahui pengaruh kepemilikan dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).
3. Mengetahui pengaruh kepemilikan dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).
4. Mengetahui pengaruh kepemilikan komite audit berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).
5. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).
6. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE).
7. Mengetahui pengaruh kepemilikan dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE).

8. Mengetahui pengaruh kepemilikan dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE).
9. Mengetahui pengaruh kepemilikan komite audit berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE).
10. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE).

D. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi fakultas ilmu administrasi pada umumnya dan konsentrasi manajemen keuangan pada khususnya terutama berkaitan dengan pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap profitabilitas perusahaan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah informasi bagi pihak lain atau bahan referensi bagi peneliti yang akan membahas bidang yang sama.
2. Kontribusi Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengguna informasi yaitu pemegang saham, manager, kreditur, karyawan, dan *steakholder* untuk lebih memahami penerapan *good corporate*

governance dalam menilai profitabilitas perusahaan. Bagi calon investor, penerapan *good corporate governance* diharapkan dapat menjadi pertimbangan sebelum melakukan keputusan investasi.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk wacana bagi perusahaan perusahaan di indonesia untuk lebih memperhatikan pentingnya penerapan *good corporate governance* dalam perusahaan agar dijadikan strategi dalam menarik calon investor untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan.
- c. Penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi akan diuraikan secara garis besar isi dari setiap bab. Sistematika penulisan skripsi dibagi menjadi 5 bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garisbesar mengenai hal-hal yang akan dibahas pada skripsi ini, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai landasan teori yang digunakan untuk memperkuat penelitian dan pembahasan singkat beberapa penelitian terdahulu. Bab ini juga menjelaskan kerangka pemikiran yang melandasi

hipotesis penelitian dan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ketiga diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Subbab dari metode penelitian ini adalah deskripsi operasional penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dari penelitian dan pembahasan hasil yang terdiri dari gambaran umum perusahaan, analisis data, dan pembahasan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang terdiri kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Hasamuddin dan Tirta (2012)

Penelitian yang dilakukan berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah menurut Direktorat Perbankan Indonesia, sedangkan sampel adalah bank umum syariah yang mempublikasikan laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan *Good Corporate Governance* periode 2008-2011. Alat analisis yang digunakan adalah PLS. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional, dan ukuran komite audit. Sedangkan, variabel dependen yang digunakan adalah *Return On Assets* (ROA) . Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara *Good Corporate Governance* (ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional, dan ukuran komite audit) terhadap kinerja bank umum syariah (*Return On Asset*

2. Arifani (2013)

Judul dalam penelitian Arifani adalah “Pengaruh GCG Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah GCG yang diproksikan dengan komite audit, proporsi kepemilikan institusional, dewan direksi, dan komisaris independen sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diproksikan oleh *Return on Equity* (ROE). Penelitian ini menyimpulkan bahwa komite audit mempunyai pengaruh positif terhadap ROE sehingga hipotesis diterima, semakin banyak komposisi komite audit maka kinerja keuangan akan teratasi dengan baik sehingga kinerja meningkat. Sedangkan kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan. Serta komisaris independen mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan.

3. Purno (2013)

Penelitian yang dilakukan berjudul “ pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap kinerja perbankan”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme *good corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan institusi, kepemilikan managerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, ukuran dewan direksi, komite audit terhadap kinerja perbankan yang diukur dengan *return on asset* (ROA). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang listing di bursa efek indonesia, sedangkan pengambilan sampel menggunakan metode purposif sampling. Pengujian hipotesis dengan analisis regresi linear berganda.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *good corporate governance* (kepemilikan institusi, kepemilikan managerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan komite audit). Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kinerja perbankan (ROA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusi dan ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap ROA, sedangkan kepemilikan managerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap ROA.

4. Oemar (2014)

Penelitian yang dilakukan berjudul “ pengaruh *corporate governance* dan keputusan pendanaan perusahaan terhadap kinerja profitabilitas dan implikasinya terhadap harga saham”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance*, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap kinerja profitabilitas serta implikasinya terhadap harga saham. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan BUMN yang terdaftar di bursa efek Indonesia, sedangkan sampel penelitian ditentukan berdasarkan metode purposif sampling. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi data panel. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *corporate governance* (komite audit, kepemilikan publik, ukuran dewan komisaris, dewan direksi, dan komisaris independen), keputusan pendanaan dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), dan kebijakan dividen dengan menggunakan *Dividen payout Ratio* (DPR), sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kinerja

profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Equity* (ROE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit, kepemilikan publik, komisaris independen, dewan direksi dan DPR berpengaruh terhadap ROE. Sedangkan ukuran dewan komisaris dan DER tidak berpengaruh terhadap ROE. Kemudian, terhadap harga saham, komite audit, komisaris independen, dan DER berpengaruh, namun kepemilikan publik, ukuran dewan komisaris, dan DPR tidak berpengaruh.

5. Widagdo dan Chariri (2014)

Judul dalam penelitian Widagdo dan Chariri adalah “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan. kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan komite audit sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diproksikan oleh *Return on Equity* (ROE). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kepemilikan institusi komisaris independen, dan dewan direksi, berpengaruh terhadap ROE. sehingga hipotesis diterima, semakin banyak komposisi komite audit maka kinerja keuangan akan teratasi dengan baik sehingga kinerja meningkat. Sedangkan kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan. Serta komisaris independent mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan.

6. Nathania (2014)

Penelitian yang dilakukan berjudul “ pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap profitabilitas perusahaan”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme *good corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan institusi, kepemilikan managerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, ukuran dewan direksi, komite audit terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan *return on equity* (ROE). Hasil penelitian menunjukkan Terdapat pengaruh signifikan antara komite audit, Dewan Direksi, kepemilikan institusional, dan komisaris independen terhadap kinerja keuangan (ROE) sedangkan tidak terdapat pengaruh signifikan kepemilikan manjerial dan komite audit mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan (ROE).

7. Tertius dan Christiawan (2015)

Penelitian yang dilakukan berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penentuan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linear berganda. Variabel independen dalam penelitian ini adalah dewan komisaris, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kinerja perusahaan dengan menggunakan ROA sebagai ukuran. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran

perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan managerial, dan ukuran perusahaan mempengaruhi ROA. Secara parsial, dewan komisaris dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan komisaris Independen dan ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap ROA.



B. Landasan Teoritis

1. *Good Corporate Governance* (GCG)

a. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi dipopulerkan oleh Jensen dan Meckling tahun 1976 merupakan dasar untuk memahami tata kelola perusahaan atau biasa disebut *corporate governance* yang berkaitan antara prinsipal dan agen. Teori keagenan ini membuat sebuah model mengenai hubungan kontraktual antara manajer (*agent*) dengan pemilik perusahaan (*principal*). Prinsipal mendelegasikan suatu tanggungjawab pengambilan keputusan pada agen sesuai kontrak kerja. Adapun tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab antara principal dan agen diatur dalam kontrak kerja yang telah disepakati.

Menurut Sutedi (2012:13) “*agency theory* menekankan pada pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga tenaga profesional (disebut *agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis”. Teori agensi menyatakan bahwa terdapat pemisahan antara pemilik sebagai principal dan manager sebagai agen yang menjalankan perusahaan, maka akan muncul permasalahan *agency* karna masing-masing pihak berusaha untuk memaksimalkan kepentingannya. Teori keagenan merupakan konsep dasar dari *corporate governance*, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah di investasikan. Keyakinan itu berupa manager

tidak akan mencuri, menggelapkan, ataupun menginvestasikan ke proyek-proyek yang tidak akan menguntungkan bagi investor.

Kebutuhan akan informasi antara manager dan investor adalah berbeda sehingga timbul *asymmetric information* (AI). *Asymmetric information* merupakan informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena distribusi informasi yang tidak sama antara principal dengan agen prinsipal seharusnya memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen, akan tetapi ternyata informasi tentang ukuran keberhasilan tidak disajikan seluruhnya oleh agen. Hal ini menyebabkan kurang adanya transparansi kinerja agen dan dapat menimbulkan manipulasi yang dilakukan oleh agen. Informasi yang tidak seimbang ini akan menimbulkan kendala bagi prinsipal untuk melakukan pengawasan tindakan terhadap agen.

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan untuk masa yang akan datang dibandingkan dengan informasi yang diketahui oleh pemilik perusahaan (investor). Manajer pada dasarnya berkewajiban memberi sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal tersebut dapat berupa pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut sangat penting bagi para pengguna terutama pihak eksternal karena kelompok ini berada dalam kondisi ketidakpastian yang sangat besar. Laporan yang diberikan juga berguna sebagai sarana pengawasan terhadap agen oleh para prinsipal untuk memastikan bahwa

modal yang telah mereka tanamkan berkembang dengan baik. Apabila kinerja agen yang ditunjukkan dalam laporan yang diterima oleh prinsipal tidak memuaskan, maka prinsipal dapat mengambil tindakan sesuai kontrak yang telah dibuat. Oleh karena itu, dalam satu perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda. Kepentingan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi perusahaan milik prinsipal dan kepentingan pribadi agen yang memegang tanggung jawab besar untuk mendapatkan imbalan yang besar juga, atau dapat dikatakan kepentingan pribadi agen sendiri. Menurut arifin (2005:11) “*agency theory* mendasarkan hubungan kontrak antar anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama.

b. Definisi *Good Corporate Governance* (GCG)

Istilah *corporate governance* pertama kali dikenalkan oleh *Cadbury Committee* tahun 1992 sebagai suatu perwujudan keprihatinan terhadap aktivitas perusahaan di Inggris. *Cadbury Committee* dalam Toha (2007:12) mendefinisikan *Good Corporate Governance* adalah :

“Prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawaban kepada *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur kewenangan direktur, manager, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan di lingkungan tertentu”.

Menurut moeljono (2005) dalam Akadun (2007:145) menjelaskan “GCG merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*”. Terdapat dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu, kedua, kewajiban perusahaan melakukan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Pengertian *corporate governance* dalam badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Penerapan praktik *Good Corporate Governance* telah diatur dalam keputusan menteri BUMN No Kep 117/MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 yang menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan / atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam operasionalnya. Fokus utama penerapan GCG saat ini adalah lingkungan perusahaan BUMN dan perusahaan terbuka.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya GCG merupakan suatu proses yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usahanya

dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder*, karyawan, kreditur, serta masyarakat. GCG juga dapat mengurangi konflik agensi sehingga mencapai tujuan perusahaan secara efisien.

c. Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Penerapan *Good corporate Governance* pada BUMN memiliki tujuan tertentu, berlandaskan keputusan menteri BUMN Nomor 117/M-MBU/2012 pasal 4 yaitu :

1. Memaksimalkan BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap *stakeholder* maupun kelestarian lingkungan sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.
6. Menyukseskan program privatisasi BUMN.

Penerapan *Good Corporate Governance* secara konsisten dapat membantu perusahaan untuk lebih siap bersaing dan menghadapi situasi-situasi yang tidak diinginkan. Menurut FCGI (2011) ada beberapa manfaat yang diperoleh bila melaksanakan *Corporate Governance*, antara lain :

1. Meningkatkan perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan, karena sekaligus akan meningkatkan *stakeholder value* dan defiden. Khusus bagi BUMN akan membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.

d. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Secara umum, terdapat lima prinsip dalam penerapan *Good Corporate Governance*, yaitu :

1. *Transparancy* (Keterbukaan)

Perusahaan dalam menjalankan kegiatannya harus menyediakan informasi yang terbuka, relevan dan tepat waktu bagi *stakeholder* dengan

cara mudah diakses dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Perusahaan harus berinisiatif mengungkapkan hal-hal penting yang berkaitan dengan pengambilan keputusan oleh para pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan yang lain (Jarkasyi,2008:39). Pengungkapan informasi yang memadai sangat diperlukan investor untuk membuat keputusan terhadap resiko dan keuntungan dari investasi (Sutedi,2012:11).

2. *Accountabilitas* (Akuntabilitas)

Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif berdasarkan *balance of power* antara manager, pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, dan auditor (Tjager et. Al., 2003:51). Perlu adanya kejelasan tugas serta fungsi organ perusahaan agar tercipta mekanisme kewenangan dan peran dalam pengelolaan perusahaan. Akuntabilitas adalah prasyarat agar mencapai kinerja yang berkesinambungan (Zarkasyi, 2008:39).

3. *Responsibility* (Responsibilitas)

Peran dari pemegang saham harus diakui sebagai mana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama aktif antara perusahaan dengan pemegang kepentingan untuk menciptakan kekayaan, lapangan kerja, perusahaan yang sehat (Tjager et. al., 2003:52). Perusahaan harus memenuhi peraturan perundangan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat di sekelilingnya agar menjaga kesinambungan usaha jangka panjang.

Adanya kesadaran akan tanggung jawab merupakan konsekuensi dari adanya kekuasaan dan memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

4. *Independency* (Kemandirian)

Independency merupakan keadaan perusahaan yang dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun. Perusahaan harus dikelola secara independen atau mandiri agar masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi (Zarkasi, 2008:40). Meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan, perusahaan harus mengembangkan beberapa aturan, pedoman, dan praktik.

5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan perlakuan yang sama atau setara terhadap hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing (Tjager *et. al.*, 2003:50). Prinsip ini mencakup kejelasan hak-hak pemegang saham dan aturan hukum untuk melindungi dari berbagai kecurangan.

e. **Pihak-Pihak Terkait dalam Pelaksanaan Pedoman Perusahaan**

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

“RUPS merupakan organ perusahaan yang kewenangannya diluar kewenangan direksi atau dewan komisaris sesuai dengan batasan yang

ditentukan dalam undang-undang atas anggaran dasar” (Zarkasi, 2008:73). Pemegang saham berhak memperoleh informasi yang berhubungan dengan perusahaan dari dewan direksi dan/atau dewan komisaris, yang berhubungan dengan RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan. Penyelenggaraan RUPS dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili.

2. Dewan Direksi

“Dewan direksi merupakan organ perusahaan berwenang dan bertanggungjawab atas pengurusan perusahaan secara penuh dalam segala hal yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan” (Zarkasi, 2008:75). Fungsi dari dewan direksi adalah sebagai wakil dari perusahaan didalam maupun diluar pengadilan. Dalam melaksanakan tugas, anggota dari dewan direksi harus semaksimal mungkin memberikan tenaga, pikiran dan perhatiannya dalam mewujudkan tujuan perusahaan.

Anggota direksi dilarang untuk memangku jabatan rangkap sebagai (a) anggota direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta dan jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; (b) jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi atau lembaga pemerintah pusat dan daerah ; dan/atau (c) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Zarkasi, 2008:76).

3. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang melakukan pengawasan sesuai dengan anggaran dasar dan memberikan nasehat pada dewan direksi. Dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Anggota dewan komisaris dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasan.

Anggota komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan, dan menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas (Zarkasi, 2008:76).

4. Pemegang Saham

Pemegang saham yang telah menginfestasikan dana dalam perusahaan memiliki hak atas kebijakan perusahaan. Pemegang saham juga memiliki hak untuk mengajukan mekanisme perlindungan terkait prosedur ganti rugi maupun perlindungan melawan pelanggaran hak khususnya bagi pemegang saham minoritas “setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perusahaan kepengadilan apabila dirugikan karena perusahaan dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS , direksi, dan/atau dewan komisaris” (Zarkasyi, 2008:85)

5. Pemangku kepentingan

Pemangku kepentingan selain pemegang saham adalah pihak yang memiliki kepentingan atas perusahaan dan terpengaruh langsung oleh keputusan perusahaan. “unsur-unsur tambahan yang membangun *corporate governance* yaitu : *suppliers, employees, investments managers dan educational institutions*” (Porter dalam Sutedi, 2012:29). Perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya tidak bisa terlepas dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) diluar organ inti perusahaan.

f. Tahap-Tahap Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Perusahaan harus memperhatikan tahapan-tahapan dalam penerapan *good corporate governance* (GCG) agar dapat berjalan lancar dan mendapat dukungan dari seluruh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Terdapat tiga tahapan dalam penerapan GCG, sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Merupakan tahap awal dimana perusahaan harus mampu memahami tentang prinsip-prinsip GCG dan *key person*. *Key person* ialah orang yang berperan dan berpengaruh terhadap keberadaan, perkembangan, dan penentu kebijakan. Menurut Kaihatu (2006:3), terdapat tiga langkah utama dalam tahap persiapan ini yaitu :

a. *Awariness Building*

Merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran tentang arti GCG dan berkomitmen dalam penerapannya.

b. *GCG Assessment*

Merupakan upaya untuk mengukur atau memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan GCG dan mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat untuk mempersiapkan struktur perusahaan yang kondusif.

c. *GCG Manual Building*

Merupakan tingkat dimana perusahaan dapat menyusun manual atau pedoman implementasi GCG. Penyusunan manual dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan.

2. Tahap Implementasi

Implementasi merupakan tahap yang penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Terdapat tiga langkah yang harus diperhatikan, yaitu :

a. Sosialisasi

Langkah yang dilakukan untuk memperkenalkan aspek-aspek yang berhubungan dengan implementasi GCG pada semua komponen perusahaan. Sosialisasi dapat dilakukan oleh tim khusus dan berada di bawah pengawasan direktur utama ataupun satu direktur yang ditunjuk.

b. Implementasi

Kegiatan yang sejajar dengan pedoman GCG sesuai dengan pemetaan yang telah dibuat. Implementasi merupakan proses pelaksanaannya. Implementasi melibatkan dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan. Implementasi ini mencakup upaya manajemen perusahaan dalam mengarahkan proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.

c. Internalisasi

Tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya memperkenalkan GCG dalam seluruh proses bisnis perusahaan dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dipastikan bahwa penerapan GCG bukan suatu kepatuhan namun benar benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan. (Kaihatu, 2006:3).

3. Tahap Evaluasi

Merupakan tahap terakhir yang perlu dilakukan secara berkesinambungan dan teratur untuk mengukur sejauh mana efektifitas penerapan GCG dilaksanakan dengan meminta pihak independen untuk melakukan audit implementasi agar tidak terjadi intervensi dari pihak tertentu yang dikhawatirkan dapat merugikan. Tahap ini dapat membantu perusahaan untuk mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

Berdasarkan penjabaran diatas, tahap-tahap dalam penerapan GCG yang dimulai dari tahap persiapan, tahap implementasi, dan terakhir tahap evaluasi merupakan tahapan yang dibutuhkan oleh perusahaan dan pelaksana GCG. Pelaksanaan GCG yang baik dalam suatu perusahaan diharapkan mampu memberikan perbaikan untuk masa yang akan datang.

g. Mekanisme *Good Corporate Governance*

“Mekanisme *corporate governance* adalah syarat-syarat pelaksanaan sistem dalam suatu badan usaha dimana berbagai pihak yang berkepentingan terdapat badan usaha tersebut dapat memastikan bahwa pihak manajer dan pihak internal badan usaha lainnya dapat memenuhi kepentingan *stakeholder*” (Sanda *et. al.*, 2005 dalam Puspitasari dan Ernawati, 2010:193). Mekanisme *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekan terjadinya masalah *agency* (Boediono, 2005:175). Terdapat dua mekanisme GCG yaitu yang berasal dari dalam perusahaan (Internal) dan yang berasal dari luar perusahaan (eksternal). Mekanisme internal merupakan cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal, terdiri dari pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manager, karyawan, dan komite audit. Sedangkan mekanisme eksternal adalah cara mempengaruhi perusahaan selain mekanisme internal yaitu pengaruh pasar dan sistem hukum untuk mengendalikan perusahaan. Penelitian ini lebih mengkaji

mekanisme kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit.

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi berbadan hukum, institusi keuangan, institusi luar negeri, dana perwalian, dan institusi lainnya “Konsentrasi kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain” (Tarjo, 2008 dalam Hisamuddin dan Tirta, 2012:120). Kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan memiliki arti penting untuk memonitor manajemen dalam mengelola perusahaan.

Institusi memegang saham mayoritas karena sumber daya yang dimiliki lebih besar jika dibandingkan dengan pemegang saham lainnya sehingga pihak institusional dapat melakukan pengawasan lebih kuat. Namun, pemegang saham mayoritas dapat mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas sehingga pemegang saham mayoritas lebih unggul dalam pengambilan keputusan. Pada umumnya, pemilik institusional akan lebih memilih untuk berinvestasi pada perusahaan yang menerapkan kontrol kuat dengan deviden yang tinggi karena kepemilikan yang tinggi mengharapkan *return* yang tinggi pula. “kepemilikan institusional dapat diukur menggunakan indikator presentase jumlah saham yang dimiliki pihak institusional dari seluruh jumlah saham perusahaan” (Boediono, 2005:175).

Rumus menghitung kepemilikan institusional:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{jumlah saham institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Sumber (Martsila dan Meiranto, 2013:7)

2. Dewan Komisaris Independen

Pada dasarnya, pemegang saham tidak secara langsung berhubungan dengan pengelolaan perusahaan, maka peran dari dewan komisaris diperlukan sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap pihak pengelola agar kepentingan perusahaan terjamin. Dewan komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, serta memberikan nasihat pada dewan direksi (Sutedi, 2012:143). Dapat dikatakan bahwa peran dari dewan komisaris dalam perusahaan sangat penting. Namun, di Indonesia terjadi dua kecenderungan. *Pertama*, peran komisaris terlalu kuat dalam perusahaan, *kedua*, peran komisaris yang lemah dalam melaksanakan fungsinya (Sutedi, 2012:146).

Maka dari itu, saat ini dunia usaha membutuhkan peran dewan komisaris independen dalam pengelolaan perusahaan. Pembentukan dewan komisaris independen diharapkan memberi perlindungan terhadap pemegang saham. Dewan komisaris maupun komisaris independen melekat tanggung jawab secara hukum dan peranan komisaris independen sangat penting. Peraturan

Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 pasal 4 mengenai komisaris independen menyebutkan bahwa:

“komisaris independen adalah dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.”

Karakteristik dewan komisaris independen dalam *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2011) adalah sebagai berikut :

- a) Komisaris bukan merupakan anggota manajemen.
- b) Komisaris independen bukan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas perusahaan.
- c) Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dan tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitas sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu.
- d) Komisaris independen bukanlah merupakan penasihat profesional perusahaan atau perusahaan lain yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.

- e) Komisaris independen bukan merupakan pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lain yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
- f) Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lain yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.
- g) Komisaris independen bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Berdasarkan peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000, persyaratan jumlah minimal dewan komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. “Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator presentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan” (Ujiyantho dan Pramuka, 2007:10).

Rumus menghitung proporsi dewan komisaris independen :

$$\text{Proporsi dewan komisaris independen} = \frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{jumlah seluruh komisaris}} \times 100\%$$

(Ujiyantho dan Pramuka, 2007:10)

3. Dewan Direksi

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan serta mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan. Tugas dan tanggung jawab dewan direksi merupakan tugas dan tanggung jawab sesama anggota direksi terhadap perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota direksi akan mengikat direksi lainnya. Sutedi (2012:129) menyebutkan, ada beberapa tanggung jawab lain yang dijalankan dewan direksi dalam perusahaan antara lain :

- a. Pertanggungjawaban dalam hal terjadi pemberian keterangan yang tidak benar dan/atau menyesatkan.
- b. Tanggung jawab sesama anggota direksi perusahaan.
- c. Tanggung jawab internal direksi terhadap perusahaan dan pemegang saham perusahaan.
- d. Tanggung jawab eksternal direksi terhadap pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan perusahaan.
- e. Pertentangan kepentingan.

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, dewan direksi dalam suatu perusahaan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota direksi. Komposisi dewan direksi harus

diperlihatkan sehingga dalam menjalankan perusahaan dapat mengambil keputusan yang efektif, cepat, tepat dan bertindak independen atau tidak memiliki kepentingan yang mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri. “ukuran dewan direksi diukur berdasarkan jumlah dari anggota dewan direksi yang ada dalam suatu perusahaan” (Faisal, 2005 dalam Purno 2013). Semakin banyak dewan direksi dalam perusahaan akan memberikan pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang lebih baik dan terkontrol.

4. Komite audit

Konsep mengenai komite audit pertama kali diperkenalkan pada dunia usaha tahun 1930-an di Amerika Serikat. Kemudian, *New York Stock Exchange* (NYSE) mewajibkan adanya komite audit sebagai persyaratan pencatatan, dan sejak saat itu setiap negara membuat ketentuan mengenai komite audit baik dalam bentuk peraturan perundangan maupun persyaratan pencatatan di Bursa. Persyaratan ini juga telah ditetapkan di Indonesia melalui pedoman *Good Corporate Governance* diterbitkan bulan Mei 2002.

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai berikut :

Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan

keuangan, manajemen risiko, pelaksana audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Sesuai dengan Kep-29/PM/2004, “komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan”. Pemegang saham mengangkat dewan komisaris untuk melakukan fungsi pengawasan, selanjutnya dewan komisaris membentuk komite audit untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan manajemen. Komite audit juga merupakan pihak yang menghubungkan antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani pengendalian.

Tugas dari komite audit seperti yang diatur dalam Kep-29/PM/2004 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan auditor internal.
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.

5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengajuan yang berkaitan dengan emiten.
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

Komite audit harus terdiri dari individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari manajemen yang mengelola perusahaan. Berdasarkan keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 menyatakan bahwa komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang dari luar perusahaan. “komisaris audit diukur dengan jumlah anggota komite audit yang ada dalam perusahaan” (Sam’ani, 2008 dalam Hisamuddin dan Tirta, 2012:126).

2. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba pada suatu periode tertentu. Profitabilitas memiliki arti penting bagi perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup dalam jangka panjang dan untuk evaluasi atas efektifitas pengelolaan perusahaan. Untuk dapat melangsungkan hidupnya, perusahaan harus berada dalam keadaan yang menguntungkan. Tanpa ada keuntungan, perusahaan akan kesulitan untuk menarik modal dari luar (Syamsuddin, 2013:59).

Kemampuan perusahaan menghasilkan laba dapat menarik minat para investor untuk menanamkan dananya. Profitabilitas perusahaan akan mempengaruhi kebijakan dari investor atas investasi yang dilakukan.

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi perusahaan, sehingga dibutuhkan alat analisis untuk menilainya yaitu dengan rasio profitabilitas.

Rasio profitabilitas mengukur perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, serta modal saham tertentu (Hanafi, 2013:42). Rasio profitabilitas menggambarkan efektifitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya yang dinilai dari seberapa besar laba yang dapat diperoleh terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Terdapat tiga rasio untuk mengukur besar kecilnya profitabilitas, yaitu *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), dan *Profit Margin* (Hanafi, 2013:42).

a. *Return On Assets* (ROA)

Return On Assets (ROA) merupakan salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dapat menggambarkan kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia dalam perusahaan (Syamsuddin, 2013:63). Aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan dari modal sendiri maupun modal asing yang telah diubah oleh perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi dalam mengelola seluruh aktiva (Sudana, 2009:26). Nilai ROA dapat memberi gambaran informasi kepada pemegang saham tentang efektifitas perusahaan dalam mengelola dana yang telah ditanamkan untuk menghasilkan laba.

Semakin tinggi rasio ROA maka dapat dikatakan semakin baik dan efisien perusahaan dalam mengelola aktiva atau aset yang dimilikinya dan membuat perusahaan memiliki peluang untuk meningkatkan pertumbuhan modal sendiri. Hal ini didasarkan pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang maksimal dengan investasi yang minimal.

Perusahaan harus mampu membuat keputusan terhadap pengalokasian sumber dana perusahaan. Pengukuran profitabilitas perusahaan menggunakan ROA memiliki keuntungan, yaitu ROA adalah pengukuran yang secara keseluruhan dapat mempengaruhi laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan neraca. Keuntungan lain dari ROA adalah perhitungan ROA sangat mudah dihitung dan dipahami. ROA dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung jawab atas profitabilitas dan unit usaha.

Rumus menghitung ROA:

$$\text{Return On Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba bersih sesudah pajak}}{\text{Total aktiva}}$$

(Syamsuddin, 2013:74)

b. *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity (ROE) merupakan kemampuan perusahaan dalam memberikan pengembalian atas investasi dari para pemegang saham perusahaan. Menurut Sudana (2009:26), ROE menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal

sendiri. Sedangkan menurut Hanafi dan Halim (2009:85), ROE mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Semakin tinggi penghasilan yang diperoleh maka semakin baik kedudukan pemilik perusahaan (Syamsuddin, 2013:64).

Rumus menghitung ROE:

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba bersih sesudah pajak}}{\text{Modal sendiri}}$$

(Syamsuddin, 2013:64)

c. *Profit Margin*

Profit Margin digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menggunakan penjualan yang dicapai perusahaan (Sudana, 2009:26). Rasio ini diukur dengan membandingkan laba bersih dengan penjualan tertentu (Hanafi, 2013:42). Semakin tinggi rasio ini, maka menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada penjualan tertentu.

Rumus menghitung *profit margin*:

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Penjualan}}$$

(Hanafi, 2013:42)

3. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan Komite Audit Terhadap *Return On Asset (ROA)* dan *Return On Equity (ROE)*

Konsep *corporate governance* yang diprosikan oleh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil survei yang dilakukan oleh CLSA pada tahun 2001 menunjukkan bahwa perusahaan yang masuk peringkat 100 teratas dalam penerapan *corporate governance* atau sekitar 20% memiliki rasio-rasio keuangan yang sangat baik dan memiliki tingkat harga saham yang tinggi bila dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan *good corporate governance* nilainya jauh lebih tinggi (Hamdani, 2016:128). Penerapan praktik *good corporate governance* dalam perusahaan diharapkan mampu memicu kinerja dari pihak agen untuk mengelola perusahaan secara efektif dan efisien. Berikut merupakan variabel hubungan *good corporate governance* per indikator dengan indikator profitabilitas.

a. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Profitabilitas

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi berbadan hukum, institusi keuangan, institusi luar negeri, dana perwalian, dan institusi lainnya. Kepemilikan institusional dipandang sebagai mekanisme kontrol yang tepat untuk mengurangi konflik keagenan dan dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan, karena memberi pengawasan yang aktif dengan memiliki para profesional dibidang

inestasi. Kepemilikan institusional yang semakin tinggi akan mampu memonitor perusahaan untuk lebih meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kepemilikan institusional mayoritas menyebabkan dalam pengambilan keputusan, pemegang saham mayoritas lebih dominan memiliki kontrol kuat dalam perusahaan sehingga kepemilikan institusional dalam perusahaan memiliki peran sebagai *monitoring agent* yang melakukan pengawasan optimal terhadap perilaku manajemen di dalam menjalankan perannya mengelola perusahaan (Sugianto, 2011) dalam Taufiq (2017). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency conflict*. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin kuat tingkat pengendalian yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan sehingga *agency conflict* yang terjadi di dalam perusahaan akan semakin berkurang sehingga nilai perusahaan akan semakin meningkat dan mampu melihat pertumbuhan peningkatan profitabilitas.

b. Penaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Profitabilitas

Dewan komisaris independen merupakan pihak yang harus bertindak independen untuk kepentingan perusahaan. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau keluarga dengan anggota komisaris lainnya, direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak secara independen (Sochib, 2016:50). Dewan komisaris independen

diharapkan tidak hanya sebagai pelengkap dari struktur organisasi perusahaan namun juga sebagai pihak yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Menurut Rimardhani (2016) komisaris independen merupakan pihak pendukung dengan posisi terbaik untuk membantu melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja para direksi dan manajer agar terlaksananya *corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan. Adanya dewan komisaris independen juga diharapkan dapat memberi fungsi pengawasan terhadap perusahaan secara objektif dan independen, menjamin pengelolaan perusahaan yang bersih dan sehat sehingga mendukung profitabilitas perusahaan. Pembentukan dewan komisaris independen diharapkan akan melindungi pemegang saham. Setidaknya jumlah komisaris independen dalam perusahaan adalah 30% dari seluruh anggota komisaris. Komisaris independen diukur dari presentase jumlah anggota komisaris dari luar perusahaan dari seluruh jumlah dewan komisaris (Ujiyantho dan Pramuka, 2007:10) dalam Rimardhani, dkk (2016). Menurut Sutedi (2012:149) menyatakan keterkaitan antara aspek pengawasan dan tanggung jawab secara yuridis dalam setiap langkah usaha yang dilakukan komisaris independen akan mempengaruhi keputusan penilaian kinerja terhadap bidang usaha. Semakin besar jumlah proporsi komisaris independen akan lebih mengedepankan kepentingan perusahaan (bersikap independen) berfokus untuk mengontrol laba yang dihasilkan perusahaan.

c. Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Profitabilitas

Dewan direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab pada pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan dan mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan. Jumlah dewan direksi yang semakin banyak akan membuat tugas-tugas yang ada dalam perusahaan dapat segera terselesaikan karena banyaknya anggota direksi yang menjalankan tugasnya (Purno, 2013 dalam Rimardhani, 2016). Para dewan direksi melaksanakan tugas dan menjalankan fungsi pengambilan keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang masing-masing. Anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Direksi bertanggungjawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (*profitabilitas*) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan (Hamdani, 2016:86-87). Para anggota dewan direksi memenuhi tugasnya dengan baik sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan.

d. Pengaruh Komite Audit Terhadap Profitabilitas

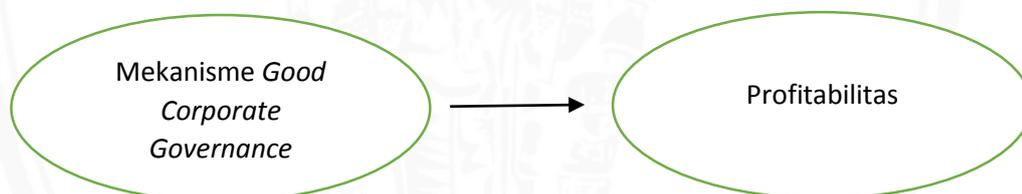
Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus (Rini dan Ghazali, 2012). Jumlah komite audit yang semakin besar memungkinkan kualitas pelaporan semakin baik dan monitoring terhadap manajemen semakin tinggi. Komite audit berhasil mempengaruhi profitabilitas perusahaan karena semakin efektif pengawasan komite audit akan mengoptimalkan profitabilitas perusahaan.

Menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2003 pasal 70 tentang Badan Usaha Milik Negara megatakan bahwa komisaris BUMN wajib membentuk komite audit yang bertugas untuk menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawasan internal maupun auditor eksternal.

4. Model Konsep dan Hipotesis

a. Model Konsep

Suatu penelitian model konsep bertujuan untuk menggambarkan fenomena dengan jelas agar mudah untuk dipahami mengenai sesuatu yang akan diteliti. Model konsep pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap profitabilitas dapat digambarkan sebagai berikut :

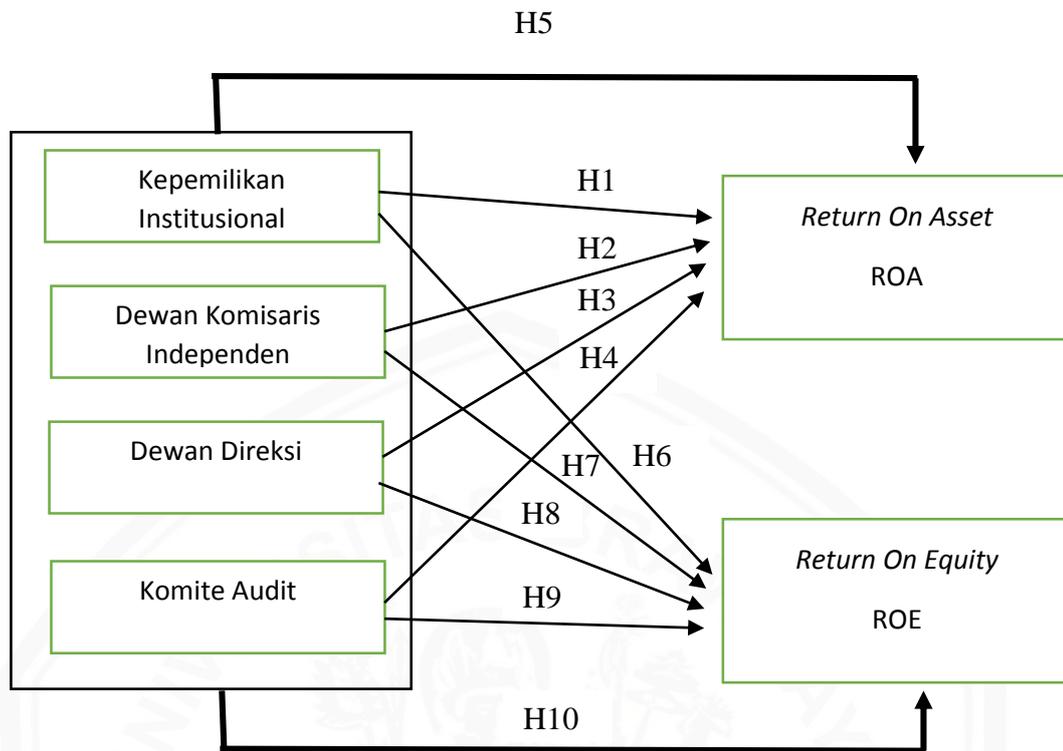


Gambar 1 Model Konsep

Sumber: Data diolah, 2017

b. Model hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Model hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2 Model Hipotesis

Sumber : Data diolah, 2017

Keterangan :

→ : Secara Simultan

→ : Secara Parsial

Berdasarkan model hipotesis diatas, maka dikembangkan beberapa hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini, sebagai berikut :

H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ROA.

H2 : Kepemilikan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap ROA.

H3 : Kepemilikan dewan direksi berpengaruh terhadap ROA.

H4 : Kepemilikan komite audit berpengaruh terhadap ROA.

H5 : Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap ROA.

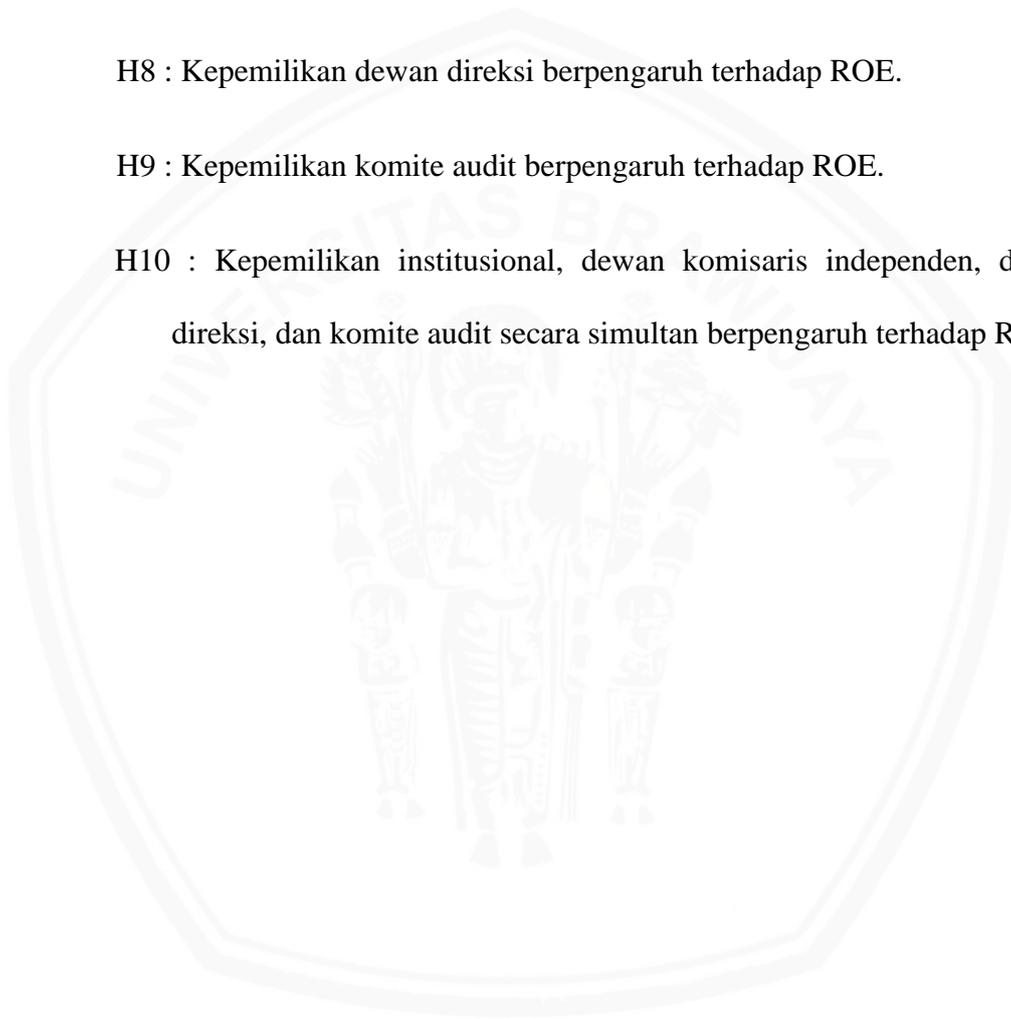
H6 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ROE.

H7 : Kepemilikan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap ROE.

H8 : Kepemilikan dewan direksi berpengaruh terhadap ROE.

H9 : Kepemilikan komite audit berpengaruh terhadap ROE.

H10 : Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap ROE.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian penjelasan (*explanatory research*) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. “*Explanatory research* merupakan jenis penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel – variabel dengan menggunakan pengujian hipotesis” (Singarimbun dan Effendi, 2008:5). *Explanatory research* merupakan jenis penelitian yang sesuai karena dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap profitabilitas perusahaan. Sifat dari penelitian ini merupakan pengulangan dari penelitian terdahulu yang serupa namun dengan variabel, sampel, dan tahun penelitian yang berbeda.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah objek penelitian atau pengambilan data yang dilakukan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan dan akurat. Dalam penelitian ini, lokasi pengambilan data adalah di Galeri Bursa Efek Indonesia (BEI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang dan melalui website www.idx.co.id. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja karena data-data yang dibutuhkan oleh penelitian sudah tersedia secara valid, lengkap, dan sudah dipertanggungjawabkan. Pengambilan data ini dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan BUMN yang *go public* dan terdaftar di BEI

selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, yang menyerahkan laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah di audit.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2011:57) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan BUMN *go public* yang terdaftar di BEI tahun 20014-2016 sebanyak 20 perusahaan BUMN. Pemilihan perusahaan BUMN sebagai populasi penelitian karena perusahaan tersebut merupakan kelompok perusahaan yang dijadikan percontohan penerapan kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya penerapan *Good Corporate Governance*.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi yang dijadikan objek penelitian. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh. "Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, sampling jenuh dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang." (Sugiyono, 2001:61).

Kriteria-kriteria dalam pemilihan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan BUMN *go public* yang terdaftar di BEI berturut-turut pada tahun 2014-2016.
2. Perusahaan BUMN yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan dalam rupiah tahun 2014-2016.
3. Perusahaan BUMN yang menyertakan komposisi kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit tahun 2014-2016.
4. Perusahaan BUMN yang melaporkan presentase nilai ROA & ROE yang bernilai positif pada laporan keuangan tahun 2014-2016.

Tabel 2 Kriteria Pemilihan Sampel

| No | Nama Perusahaan | Kriteria Pemilihan Sampel | | | | Sampel |
|-----------|--|---------------------------|---|---|---|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | PT. Indofarma (Persero) Tbk | √ | √ | √ | - | - |
| 2 | PT. Kimia Farma (Persero) Tbk | √ | √ | - | √ | - |
| 3 | PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | √ | √ | - | √ | - |
| 4 | PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk | √ | √ | √ | - | - |
| 5 | PT. Adhi Karya (Persero) Tbk | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | PT. Waskita Karya (Persero) Tbk | √ | √ | - | √ | - |
| 9 | PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11 | PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13 | PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk | √ | √ | √ | - | - |
| 14 | PT. Bukit Asam (Persero) Tbk | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15 | PT. Timah (Persero) Tbk | √ | √ | √ | √ | √ |

| No | Nama Perusahaan | Kriteria Pemilihan Sampel | | | | Sampel |
|----|---|---------------------------|---|---|---|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 16 | PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk | √ | - | √ | - | - |
| 17 | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18 | PT. Jasa Marga (Persero) Tbk | √ | √ | √ | √ | √ |
| 19 | PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk | √ | √ | √ | - | - |
| 20 | PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | √ | √ | √ | √ | √ |

Sumber : Data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan kriteria-kriteria sampel penelitian yang telah ditentukan, maka diperoleh sampel sebanyak 12 perusahaan dengan data observasi sebanyak 20 data pada periode penelitian selama 3 tahun dari 2014-2016 dari total perusahaan BUMN yang ada sebanyak 118 perusahaan.

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen, yaitu :

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen merupakan variabel bebas yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel dependen (variabel terikat) ataupun variabel lain. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi dan komisi audit.

a. Kepemilikan Institusional (X_{KI})

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi berbadan hukum, institusi keuangan, institusi luar negeri, dana perwalian, dan institusi lainnya. Kepemilikan Institusional dapat diukur dengan menggunakan indikator presentase jumlah saham yang dimiliki pihak institusional dari seluruh jumlah saham perusahaan.

Rumus menghitung kepemilikan institusional :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{jumlah saham institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

(Martsila dan Meiranto, 2013:7)

b. Proporsi Dewan Komisaris Independen (X_{DKI})

Dewan komisaris independen adalah pihak yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota komisaris lainnya, hubungan direksi dan atau pemegang saham pengendali, ataupun hubungan lain yang akan mempengaruhi kemampuan bertindak secara independen. Proporsi dewan komisaris independen dapat diukur dengan menggunakan indikator presentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan.

Rumus menghitung proporsi dewan komisaris independen:

$$\text{Proporsi dewan komisaris independen} = \frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{jumlah seluruh komisaris}} \times 100\%$$

(Ujiyantho dan Pramuka, 2017:10)

c. Dewan Direksi (X_{DD})

Dewan direksi merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, dewan direksi dalam suatu perusahaan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota direksi. Ukuran dewan direksi diukur berdasarkan jumlah dari anggota dewan direksi yang ada dalam suatu perusahaan.

d. Komite Audit (X_{KA})

Komite audit adalah pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, audit eksternal, dan sistem pengendalian internal. Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 menyatakan bahwa komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang dari luar perusahaan. Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit yang ada dalam perusahaan.

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen merupakan variabel terikat yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel lainnya. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). ROA merupakan salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dapat menggambarkan kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan

dengan jumlah seluruh aktiva yang tersedia dalam perusahaan. Alasan penggunaan ROA dalam penelitian ini karena dengan ROA, investor dapat melihat bagaimana perusahaan mengoptimalkan penggunaan asetnya secara efisien untuk memaksimalkan laba yang juga menjadi tujuan GCG.

Rumus menghitung ROA:

$$\text{Return On Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba bersih sesudah pajak}}{\text{Total aktiva}}$$

(Syamsuddin, 2013:74)

ROE merupakan salah satu rasio profitabilitas yang disebut juga sebagai rentabilitas modal sendiri. ROE mempunyai arti penting bagi para pemegang saham, yaitu untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan laba bersih, sedangkan bagi pihak manajemen, ROE mempunyai arti penting untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. ROE merupakan suatu pengukuran dari perhitungan *income* yang tersedia bagi pemilik perusahaan baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. Menurut Sartono (2011:124), ROE mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. ROE yang semakin tinggi berarti semakin efisien penggunaan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan ROE sejalan dengan usaha meningkatkan harga saham yang

merupakan pencerminan dari peningkatan kesejahteraan pemegang saham sehingga menjadi tujuan GCG.

Rumus menghitung ROE:

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba sesudah pajak}}{\text{Modal Sendiri}}$$

(Syamsuddin, 2013:64)

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data sekunder dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Dalam hal ini, dokumen perusahaan yang dimaksud adalah laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis. Untuk menganalisis menggunakan bantuan *software* IBM SPSS versi 23.0 for Windows.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dengan ringkas variabel-variabel dalam penelitian. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk memberi gambaran mengenai nilai maksimum,

nilai minimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Statistik deskriptif menyajikan ukuran numerik yang penting bagi data sampel. Ukuran numerik ini adalah untuk menyederhanakan data ke bentuk yang lebih ringkas yang mengarah pada suatu penjelasan.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi asumsi-asumsi dasar. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji Normalitas, uji Multikolinieritas, uji Heteroskedastisitas, dan uji Autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen, keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen, keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. “Ada dua cara untuk mengetahui apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik” (Ghazali, 2011:160). Data dapat dikategorikan terdistribusi normal bila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram menunjukkan pola lonceng, sebaliknya jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti

arah garis diagonal atau grafik histogram tidak mengikuti pola lonceng maka data tidak terdistribusi normal. Selain itu, uji normalitas dapat dilihat melalui tabel hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan taraf signifikansi lebih dari 0,05.

b. Uji Multikolinjaritas

Uji multikolinjaritas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan antar variabel independen. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2011:105). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinjaritas dalam regresi dapat dilihat dari *tolerance value* dan nilai *variance inflation factor* (VIP). Seperti yang dijelaskan oleh Ghozali (2011:106) sebagai berikut :

1. Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinjaritas antar variabel independen dalam model regresi.
2. Jika nilai *tolerance* $< 0,1$ dan nilai VIF > 10 , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinjaritas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika beda

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali,2011:139). Cara mendeteksi heteroskedastisitas yaitu dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu dalam grafik *Scatterplot*. Bila ada pola tertentu, seperti titik-titik membentuk pola tertentu dan teratur maka terjadi heteroskedastisitas, dan sebaliknya bila tidak ada pola tertentu, titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka pola tersebut menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

“Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode $t-1$ (sebelumnya)” (Ghozali, 2011:110). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada autokorelasi. Adanya autokorelasi sering ditemukan pada data time series karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang saling berkaitan. Model regresi yang baik adalah yang terbebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi, dapat dilakukan uji statistik melalui uji *Durbin-Watson* (DW test). Dasar keputusan ada atau tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut :

1. Bila nilai DW terletak diantara batas atas atau *upper bound* (du) dan $(4-du)$ maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.

2. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau *lower bound* (d_l) maka koefisien autokorelasi lebih dari nol, berarti ada autokorelasi positif.
3. Bila nilai DW lebih besar dari ($4-d_l$) maka koefisien autokorelasi kurang dari nol, berarti ada autokorelasi negatif.
4. Bila nilai DW terletak antara d_u dan d_l atau DW terletak antara ($4-d_u$) dan ($4-d_l$) maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel independen atau lebih dengan satu variabel dependen (Riduan dan Sunarto, 2011:108). Model peramalan regresi linear berganda adalah sebagai berikut (Riduan dan Sunarto, 2011:108):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + e$$

Keterangan :

Y : Variabel dependen

X : Variabel independen

a : konstanta

β : koefisien regresi

e : error

Nilai konstanta muncul apabila satuan yang digunakan oleh masing-masing variabel dalam penelitian adalah sama, sehingga interpretasi persamaan regresi menggunakan *unstandardized coefficients beta*. Namun, apabila berbeda, maka menggunakan *standardized coefficients beta* sehingga tidak ada konstantanya. “Keuntungan dengan menggunakan *standardized beta* adalah mampu mengeliminasi perbedaan unit ukuran pada variabel independen. Jika ukuran variabel independen tidak sama (ada kg, Rp, liter,dll), maka sebaiknya interpretasi persamaan regresi menggunakan *standardized beta*” (Ghozali, 2011:102).

Satuan yang digunakan oleh variabel-variabel dalam penelitian ini adalah berbeda sehingga menggunakan *standardized beta* untuk interpretasi persamaan regresi dan tidak ada konstantanya. Adapun model persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini sebagai berikut

$$Y_{ROA} = \beta_1 X_{KI} + \beta_2 X_{DKI} + \beta_3 X_{DD} + \beta_4 X_{KA} + e$$

Keterangan :

YROA : Variabel dependen *Return On Asset* (ROA)

XKI : Variabel independen Kepemilikan Institusional (KI)

XDKI : Variabel independen Dewan Komisi Independen (DKI)

XDD : Variabel independen Dewan Direksi (DD)

XKA : Variabel independen Komite Audit (KA)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisiensi regresi

e : error

$$Y_{ROE} = \beta_1 X_{KI} + \beta_2 X_{DKI} + \beta_3 X_{DD} + \beta_4 X_{KA} + e$$

Keterangan :

| | |
|--------------------------------------|--|
| YROE | : Variabel dependen <i>Return On Equity</i> (ROE) |
| XKI | : Variabel independen Kepemilikan Institusional (KI) |
| XDKI | : Variabel independen Dewan Komisi Independen (DKI) |
| XDD | : Variabel independen Dewan Direksi (DD) |
| XKA | : Variabel independen Komite Audit (KA) |
| $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ | : Koefisiensi regresi |
| e | : error |

4. Pengujian hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang telah dibuat diterima atau ditolak. Secara statistik, dapat diukur dengan uji F statistik, uji t statistik dan koefisiensi determinasi (R^2).

a. Uji F Statistik (Uji Simultan)

Uji F statistik dilakukan dengan menguji secara serempak (simultan) apakah semua variabel independen yang digunakan dalam model regresi secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011:98). Variabel independen yang berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen menunjukkan bahwa persamaan model regresi dalam kriteria cocok. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel.

Berikut ini adalah prosedur statistik dari uji F:

1. Menentukan formulasi hipotesis

H_0 : X_i tidak ada pengaruh terhadap Y.

H_a : X_i ada pengaruh terhadap Y.

2. Menentukan derajat bebas (df) = $k ; n-k-1$, untuk mencari nilai F hitung dengan taraf signifikansi 95% atau tingkat kesalahan yang dapat diterima (α) sebesar 5%.
3. Menentukan nilai uji F statistik
4. Menentukan kriteria pengambilan keputusan :
 - a. Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya bahwa secara simultan semua variabel independen (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y)
 - b. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa secara simultan semua variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

c. Uji t Statistik (Uji Parsial)

Menurut Ghozali (2011:98) uji t statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individu dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai signifikan t setiap variabel pada hasil regresi dengan tingkat signifikan 0,05 ($\alpha=5\%$). Hipotesis statistik sebagai berikut :

H_0 : b_i (koefisien regresi variabel independen X_i) = 0, artinya secara parsial variabel independen (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

H_a : b_i (koefisien regresi variabel independen X_i) $\neq 0$, artinya secara parsial variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y)

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- a. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti secara parsial variabel independen X_i tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).
- b. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti secara parsial variabel independen X_i tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Atau dengan melihat tabel Anova hasil pengolahan data :

- a. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti tidak signifikan.
- b. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti signifikan.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisiensi determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur tingkat kelayakan model. R^2 merupakan besaran atau nilai yang dipakai untuk menunjukkan seberapa jauh variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Kelemahan koefisiensi determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. Oleh karena itu, dianjurkan menggunakan *Adjusted R^2* saat mengevaluasi model regresi terbaik. Koefisien determinasi mempunyai nilai antara nol sampai satu ($0 \leq R^2 \leq 1$), semakin R^2 mendekati 1 maka model semakin baik, dan sebaliknya semakin R^2 mendekati nol maka model semakin tidak layak.

Nilai koefisiensi determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:97).



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum objek Penelitian

1. Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen kenangan jangka panjang yang dapat diperjual belikan, baik obligasi, saham, reksa dana, instrumen derivatif atau instrumen lainnya. Undang-Undang Pasar Modal Ne 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai "Kegiatan yang bersangkutan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek". Pasar modal sebagai sarana pendanaan perusahaan maupun institusi lain dan sebagai sarana prasarana kegiatan jual beli serta kegiatan yang terkait lainnya. Instrumen yang diperjual belikan di pasar modal adalah instrumen jangka panjang (lebih dari satu tahun) seperti saham, obligasi, waran, reksa dana, dan instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain lain. Peran pasar modal bagi perekonomian negara sangat penting, karena pasar modal menjalankan dua fungsi, pertama, sebagai sarana perusahaan untuk mendapatkan dana dari pemodal (investor), kedua, sebagai sarana masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain.

Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah pasar modal yang didirikan pertama kali oleh Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia tahun 1912, namun ditutup karena adanya Perang Dunia 1. Tujuan didirikannya pasar modal oleh

Pemerintah Hindia Belanda adalah untuk kepentingan pemerintah kolonial. Perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak dapat berjalan sesuai harapan karena beberapa faktor seperti Perang Dunia I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah Belanda ke pemerintah Republik Indonesia, serta berbagai kondisi lain yang menyebabkan kegiatan bursa efek menjadi terhambat. Bursa efek kembali di buka pada tanggal 10 Agustus 1977 dan ditangani oleh Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM). iustitasi baru di bawah Departemen Keuangan. Kegiatan perdagangan dan kapitalisasi pasar saham mulai meningkat seiring dengan perkembangan pasar finansial dan sektor swasta yang puncak perkembangannya pada tahun 1990.

Adapun visi dan misi Bursa Efek Indoncsia adalah bagai berikut:

Visi : menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia.

Misi : menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten melalui pemberdayaan anggota bursa dan partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya serta penerapan good governance.

2. Gambaran Umum Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan dalam pelelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016 berdasarkan teknik purposive sampling. Berikut ini adalah daftar perusahaan BUMN yang menjadi sampel dalam penelitian ini :

Tabel 3 Daftar Perusahaan BUMN yang Menjadi Sampel Penelitian Tahun 2014-2016

| No. | Kode | Nama Perusahaan |
|-----|------|--|
| 1 | ADHI | PT. Adhi Karya (Persero) Tbk |
| 2 | PTPP | PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk |
| 3 | WIKA | PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk |
| 4 | BBNI | PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 5 | BBRI | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| 6 | BBTN | PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
| 7 | BMRI | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| 8 | PTBA | PT. Bukit Asam (Persero) Tbk |
| 9 | TINS | PT. Timah (Persero) Tbk |
| 10 | SMGR | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk |
| 11 | JSMR | PT. Jasa Marga (Persero) Tbk |
| 12 | TLKM | PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk |

Sumber: Data diolah, 2018

a. PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI)

PT Adhi Karya didirikan pada tanggal 11 Maret 1960. Pada tahun 2004, ADHI menjadi perusahaan konstruksi pertama yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sebagai perseroan terbuka, ADHI terdorong untuk terus memberikan yang terbaik bagi setiap pemangku kepentingan, termasuk bagi kemajuan industri konstruksi di Indonesia. Visi dari ADHI yaitu menjadi perusahaan konstruksi terkemuka di Asia Tenggara. Sedangkan misi dari ADHI yaitu berkinerja berdasarkan atas peningkatan *Corporate value* secara *incorporated*, melakukan proses pembelajaran (*learning*) dalam mencapai pertunbuan (*down to earth*), proaktif melaksanakan lima lini bisnis secara profesional, *governance*, mendukung pertumbuhan perusahaan, serta berpartisipasi

aktif dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) seiring pertumbuhan perusahaan. Bidang usaha ADHI antara lain kontraktor sipil dan gedung, *Engineering Procurement Construction* (EPC), bisnis properti, bisnis *real estate*, dan investasi infrastruktur.

b. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP)

Nama PT PP (Persero) Tbk secara resmi digunakan pada 1971 setelah sebelumnya menggunakan nama NV Pembangunan Perumahan pada 1953 dan PN Pembangunan Perumahan pada 1960. selama lebih dari enam dekade PTPP menjadi pemain utama dalam bisnis konstruksi nasional dengan menyelesaikan berbagai proyek besar di Indonesia. Tahun 2009, PTPP melakukan *Initial Public offering* berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2009 mengenai Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara, melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada PTPP tanggal 28 Desember 2009. Tanggal 9 Februari 2010, saham perseroan resmi diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Visi dari PTPP adalah menjadi perusahaan konstruksi dan investasi terkemuka Indonesia yang berdaya saing internasional. Misi dari PTPP adalah menyediakan jasa konstruksi bernilai tambah tinggi untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan, meningkatkan kapabilitas, kapasitas dan kesejahteraan karyawan secara berkesinambungan, menyediakan nilai tambah yang tinggi bagi semua pemangku kepentingan, menciptakan sinergi strategis dengan mitra kerja, mitra usaha dan klien, serta memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan masyarakat melalui pengembangan *Green Corporation*. PTPP memiliki kegiatan usaha yang mencakup bidang jasa konstruksi (bangunan gedung, jalan/jembatan, pengairan, pelabuhan),

properti (komersial, perumahan, hotel), EPC (*power plant* dan *mining*), percetakan, peralatan, dan investasi.

c. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA)

PT Wijaya Karya didirikan pada tanggal 11 Maret 1960 dengan nama Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja. WIKA mengawali usahanya dengan membangun instalasi listrik dan pipa air. WIKA terus bertumbuh dengan keberhasilannya dalam penawaran saham perdana IPO pada 27 oktober 2007 di Bursa Efek Indonesia. Visi dari WIKA adalah menjadi salah satu perusahaan terbaik di bidang EPC (*Engineering, Procurement & Construction*) dan Investasi terintegrasi di Asia Tenggara. Misi WIKA adalah menyediakan produk dan jasa yang unggul dan teradu di bidang EPC dan investasi untuk infrastruktur, gedung bertingkat, energi, industri plant, industri dan properti, memenuhi harapan pemangku kepentingan utama, mengimplementasikan etika bisnis untuk mendukung tata kelola perusahaan yang berkesinambungan, ekspansi strategis ke luar negeri, serta mengimplementasikan *best practice* dalam sistem manajemen terpadu. Pilar bisnis dari WIKA antara lain industri, infrastruktur dan bangunan, energi dan rencana industri realty dan properti, serta investasi.

d. PT Bank Negara Indonesia (Perseru) Tbk (BBNI)

PT Bank Negara Indonesia didirikan pada tahun 1964. merupakan bank BUMN pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek surabaya tahun 1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saing di tengah industri perbankan nasional, BNI

melakukan aksi korporasi antara lain proses rekapitalisasi oleh Pemerintah tahun 1999 divestasi saham Pemerintah tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas tahun 2010. Visi dari BBNI adalah menjadi bank yang unggul, terkemuka, dan terdepan dalam layanan dan kinerja Misi dari BBNI adalah memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah, dan selaku mitra pilihan utama, meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor, menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan komunitas, serta menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik.

e. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)

PT Bank Rakyat Indonesia dimulai sejak 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah dengan nama "*Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren*" yang setelah mengalami beberapa kali perubahan nama kemudian resmi menjadi Bank Rakyat Indonesia sejak 16 Desember 1968 dengan bidang usaha perbankan. Saham perseroan telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 10 November 2003 dengan kode perdagangan BBRI. Visi BBRI adalah menjadikan BRI sebagai bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Misi dari BBRI adalah melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang

handal dengan melaksanakan manajemen resiko yang efektif serta praktik Good Corporate Governance yang sangat baik, serta memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Produk dan layanan BBRI antara lain produk simpanan, produk pinjaman (kredit mikro, kredit ritel komersial, kredit konsumen, kredit program, kredit menengah / korporasi), serta jasa bank (jasa bisnis, keuangan, kelembagaan, e-banking, jasa layanan bisnis internasional, layanan treasury, layanan BRI prioritas, dan wealth management BRI.

f. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN)

PT Bank Tabungan Negara didirikan pada tahun 1897 dengan nama Postspaarbank. Tahun 1950 Pemerintah Indonesia mengubah nama menjadi Bank Tabungan Pos dan kemudian berganti lagi menjadi Bank Tabungan Negara pada tahun 1963 dengan bidang usaha bank umum. PT Bank Tabungan Negara mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan sekuritisasi aset melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA) Visi BBTN adalah menjadi bank yang terdepan dalam pembiayaan perumahan. Misi dari BBTN adalah memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri terkait, pembiayaan konsumsi, dan usaha kecil menengah, meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pembangunan produk, jasa, dan jaringan strategi berbasis teknologi terkini, menyiapkan dan mengembangkan Human Capital yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas tinggi, melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan

Good Corporate Governance untuk meningkatkan Shareholde Value, serta memedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya.

g. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)

PT Bank Mandiri didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai upaya pemerintah Indonesia dalam merestrukturisasi perbankan pasca krisis moneter tahun 1998. Saham Perseroan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 14 Juli 2003 dengan kode saham BMRI. Visi BMRI adalah menjadi lembaga keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif. Misi BMRI adalah berkomitmen membangun hubungan jangka panjang yang didasari atas kepercayaan baik dengan nasabah bisnis maupun perseorangan, melayani seluruh nasabah dengan standar layanan internasional melalui penyediaan solusi keuangan yang inovatif, ingin dikenal karena kinerja, sumber daya manusia dan kerjasama tim yang baik, serta mewujudkan pertumbuhan dan kesuksesan bagi pelanggan dengan mengambil peran aktif dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang Indonesia dan selalu menghasilkan timbal balik yang tinggi secara konsisten bagi pemegang saham.

h. PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA)

PT Bukit Asam didirikan pada 2 Maret 1981. Sebelumnya, tahun 1950 menjadi Perusahaan Negara (PN) disebut PN Tambang Arang Bukit Asam, kemudian pada 1981 berubah menjadi Perseroan dan namanya berganti menjadi PT Tambang Batubara Bukit Asam. Bidang usaha PTBA adalah pengembangan bahan-bahan galian, terutama pertambangan batubara sesuai dengan ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku. PTBA tercatat sebagai perusahaan public di Bursa Jakarta dengan 25 persen sahamnya dimiliki public. Harga saham pertama tercatat pada Rp575 dengan kode saham PTBA. Visi PTBA adalah perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. Misi PTBA adalah mengelola sumber energi dengan mengembangkan kompetensi korporasi dan keunggulan insani untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi stakeholder dan lingkungan.

i. PT Timah (persero) Tbk (TINS)

Tahun 1953-1958 tiga perusahaan tambang timah Belanda di Indonesia dinasionalisasikan menjadi Perusahaan Negara (PN) Tambang Timah Bangka, Belitung, dan Singkep. Tahun 1976 status PN Tambang Timah dan Proyek Pelabuhan Timah Mentok diubah menjadi PT Tambang Timah (Persero) yang seluruh sahamnya dimiliki Negara Republik Indonesia. Pada tahun 1995, PT Tambang Timah (Persero) mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, dan London Stock Exchange, dan berubah nama menjadi PT Timah (Persero) Tbk. Visi TINS adalah menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan. Misi TINS adalah membangun sumber daya manusia yang tangguh, unggul, dan bermartabat, melaksanakan tata kelola penambangan yang baik dan benar, serta mengoptimalkan nilai perusahaan dan kontribusi terhadap pemegang saham serta tanggung jawab sosial.

j. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR)

PT Semen Indonesia sebelumnya bernama PT Semen Gresik (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri semen, Diresmikan di Gresik tanggal 7 Agustus 1957 oleh Presiden RI pertama dengan kapasitas terpasang 250.000 ton semen per tahun. Saham Perseroan telah tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (kini menjadi Bursa Efek Indonesia) melalui IPO yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 1991 dengan kode perdagangan saham SMGR. SMGR juga merupakan perusahaan BUMN pertama yang go public dengan menjual 40 juta lembar saham kepada masyarakat. Visi SMGR adalah menjadi perusahaan persemenan internasional yang terkemuka di Asia Tenggara. Misi SMGR adalah mengembangkan usaha persemenan dan industri terkait yang berorientasi kepuasan konsumen, mewujudkan perusahaan berstandar internasional dengan keunggulan daya saing dan sinergi untuk meningkatkan nilai tambah secara berkesinambungan, mewujudkan tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan, memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan (stakeholders), serta membangun kompetensi melalui pengembangan sumber daya manusia.

k. PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR)

PT Jasa Marga didirikan pada tanggal 1 Maret 1978. Jasa Marga menjadi perusahaan terbuka melalui Initial Public Offering (IPO) dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 November 2007. Kegiatan usaha JSMR adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada

umumnya, khususnya pembangunan di bidang perusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan terbatas. Kegiatan usaha utama JSMR adalah melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol, serta mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (Rumijatol) dan lahan yang berbatasan dengan Rumijatol untuk tempat istirahat dan pelayanan berikut fasilitas-fasilitas dan usaha lainnya. Visi dari JSMR adalah menjadi perusaha pengembang dan operator jalan tol terkemuka di Indonesia. Misi JSMR adalah mewujudkan percepatan pembangunan jalan tol, menyediakan jalan tol yang efisien dan andal, serta meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa.

1. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM)

PT Telekomunikasi Indonesia didirikan pada tanggal 19 November 1991. TLKM bergerak di bidang jasa layanan jasa dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Saham Perseroan dicatitkan di New York Indonesia Stock Exchange (NYSE), Bursa Efek Indonesia (sebelumnya Bursa Efek Jakarta), dan Bursa Efek Surabaya (yang bergabung dengan Bursa Efek Jakarta pada tahun 2003) pada tanggal 14 November 1995. Visi dari TLKM adalah to become a leading teiecomunication, information, media, edutainment and services (TIMES) player in the region. Misi dari TLKM adalah menyediakan layanan “more for less” TIMES dan menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia. Leading memiliki arti kinerja TLKM pada aspek finansial (pendapatan dan laba) dan kapitalisasi pasar termasuk dalam kelompok operator telekomunikasi unggulan (baik yang hanya memiliki portofolio telekomunikasi maupun TIMES) di kawasan regional. Region

memiliki arti kawasan Asia, sehingga kinerja TLKM akan dibagi dengan para operator telekomunikasi di kawasan Asia. More for Less adalah suatu model bisnis baru yang mengutamakan benefit lebih tinggi dari harga. Model bisnis ini sering disebut sebagai paradox Marketing, yaitu memberikan benefit atau value yang lebih banyak (*more*) dengan harga yang lebih rendah (*for less*).

B. Analisis Statistik Deskriptif

Deskripsi Variabel menggambarkan dengan ringkas mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Deskripsi variabel dapat diketahui melalui hasil analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan data dan membuat ringkasan data dalam penelitian. Pengolahan data dalam penelitian explanatory membutuhkan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum atas data yang diteliti dan mempermudah mengetahui Perhitungan data, rata-rata, dan standar deviasi.

Statistik deskriptif yang disajikan meliputi nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Nilai minimum menunjukkan nilai terendah data dan nilai maksimum menunjukkan nilai tertinggi data. Rata-rata menunjukkan kisaran nilai. Sedangkan standar deviasi menunjukkan persebaran suatu data terhadap rata-rata, semakin kecil nilai standar deviasi maka nilai data tersebar semakin dekat dengan nilai rata-ratanya, dan sebaliknya semakin besar nilai standar deviasi maka nilai data tersebut semakin jauh dengan nilai rata-ratanya. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan memiliki arti penting untuk memonitor manajemen dalam mengelola perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi berbadan hukum, institusi keuangan, institusi luar negeri, dana perwalian, dan institusi lainnya.

Tabel 6 Kepemilikan Institusional Perusahaan Sampel Tahun 2014-2016 (%)

| NO | KODE PERUSAHAAN | Proporsi Komisaris Independen | | | Rata-Rata |
|----|------------------------|-------------------------------|-------|-------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1 | ADHI | 83,99 | 86,30 | 82,20 | 84,16 |
| 2 | PTPP | 97,07 | 97,77 | 95,93 | 96,92 |
| 3 | WIKA | 93,49 | 95,53 | 95,07 | 94,70 |
| 4 | BBNI | 98,81 | 98,21 | 98,10 | 98,37 |
| 5 | BBRI | 98,02 | 98,94 | 98,87 | 98,61 |
| 6 | BBTN | 95,01 | 96,08 | 96,27 | 95,79 |
| 7 | BMRI | 99,14 | 98,87 | 99,10 | 99,04 |
| 8 | PTBA | 97,79 | 96,22 | 97,82 | 97,28 |
| 9 | TINS | 91,44 | 89,28 | 82,87 | 87,86 |
| 10 | SMGR | 99,33 | 98,50 | 98,04 | 98,62 |
| 11 | JSMR | 98,92 | 98,46 | 94,28 | 97,22 |
| 12 | TLKM | 99,49 | 99,60 | 99,43 | 99,51 |
| | Nilai Tertinggi | 99,49 | 99,60 | 99,43 | |
| | Nilai Terendah | 83,99 | 86,30 | 82,20 | |
| | Rata – Rata | 96,04 | 96,15 | 94,83 | 95,67 |
| | Std. Deviation | 4,58 | 4,15 | 5,97 | 4,85 |
| | Jumlah Sampel | 36 | | | |

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 6 di atas, menunjukkan informasi bahwa nilai KI tertinggi pada tahun 2014 yaitu PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM) sebesar 99,49%

dan nilai KI terendah yaitu PT Adhi Karya (ADHI) sebesar 83,99%. Pada tahun 2015 nilai KI tertinggi yaitu PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM) sebesar 99,60% dan nilai KI terendah yaitu PT Adhi Karya (ADHI) sebesar 86,30%. Pada tahun 2016 nilai KI tertinggi yaitu PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM) sebesar 99,43% dan nilai KI terendah yaitu yaitu PT Adhi Karya (ADHI) sebesar 82,20%. PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM) memiliki nilai rata-rata presentase kepemilikan institusional tertinggi selama tahun 2014-2016 sebesar 99,51%. PT. Adhi Karya (ADHI) memiliki nilai rata-rata presentase kepemilikan institusional terendah selama tahun 2014-2016 dibandingkan perusahaan sampel lainnya yaitu sebesar 84,16%. Nilai rata-rata kepemilikan institusional adalah sebesar 95,67%, standar deviasi sebesar 4,85% menunjukkan nilai kepemilikan institusional mempunyai persebaran yang sangat baik. Nilai rata-rata yang tinggi menunjukkan bahwa presentase kepemilikan institusional yang dimiliki oleh perusahaan BUMN yang menjadi sampel penelitian cenderung cukup tinggi dan seluruh perusahaan sampel penelitian didominasi oleh saham yang dimiliki institusi.

2. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepemilikan saham atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Pembentukan dewan komisaris independen diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap para pemegang saham.

Tabel 7 Proporsi Dewan Komisaris Independen Perusahaan Sampel Tahun 2014-2016 (%)

| NO | KODE PERUSAHAAN | Proporsi Komisaris Independen | | | Rata- Rata |
|------------------------|--------------------|----------------------------------|-------|-------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1 | ADHI | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 |
| 2 | PTPP | 40,00 | 33,33 | 33,33 | 35,55 |
| 3 | WIKA | 40,00 | 42,86 | 50,00 | 44,29 |
| 4 | BBNI | 50,00 | 66,67 | 62,50 | 59,72 |
| 5 | BBRI | 62,50 | 62,50 | 55,56 | 60,19 |
| 6 | BBTN | 50,00 | 57,14 | 42,86 | 50,00 |
| 7 | BMRI | 57,14 | 50,00 | 50,00 | 52,38 |
| 8 | PTBA | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 |
| 9 | TINS | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 46,67 |
| 10 | SMGR | 42,86 | 42,86 | 28,57 | 38,10 |
| 11 | JSMR | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 |
| 12 | TLKM | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 42,86 |
| Nilai Tertinggi | | 62,50 | 66,67 | 62,50 | |
| Nilai Terendah | | 33,33 | 33,33 | 28,57 | |
| Rata – Rata | | 43,78 | 45,68 | 42,97 | 44,15 |
| Std. Deviation | | 9,43 | 11,78 | 10,73 | 10,45 |
| Jumlah Sample | | 36 | | | |

Sumber: Data sekunder diolah. 2018

Berdasarkan tabel 7 di atas, menunjukkan informasi bahwa nilai DKI tertinggi pada tahun 2014 yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) sebesar 62,50% dan nilai DKI terendah yaitu PT Adhi Karya (ADHI), PT Bukit Asam (PTBA), PT Jasa Marga (JSMR) masing-masing sebesar 33,33%. Pada tahun 2015 nilai DKI tertinggi yaitu PT Bank Negara Indonesia (BBNI) sebesar 66,67% dan nilai DKI terendah yaitu PT Adhi Karya (ADHI), PT Pembangunan Perumahan (PTPP), PT Bukit Asam (PTBA), PT Jasa Marga (JSMR) masing-masing sebesar 33,33%. Pada tahun 2016 nilai DKI tertinggi yaitu PT Bank

Negara Indonesia (BBNI) sebesar 62,50% dan nilai DKI terendah yaitu yaitu PT Adhi Karya (ADHI), PT Pembangunan Perumahan (PTPP), PT Bukit Asam (PTBA), PT Jasa Marga (JSMR) masing-masing sebesar 33,33%. PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) memiliki nilai rata-rata proporsi dewan komisaris independen tinggi tahun 2014-2016 sebesar 60,19%. Sedangkan PT Adhi Karya (ADHI), PT Bukit Asam (PTBA), dan PT Jasa Marga (JSMR) memiliki nilai rata-rata proporsi dewan komisaris independen terendah tahun 2014-2016 sebesar 33,33%, Proporsi dewan komisaris independen dari setiap perusahaan relatif konstan selama tiga tahun pengamatan. Nilai rata-rata dewan komisaris independen adalah sebesar 44,14% yang berarti bahwa rata-rata ukuran dewan komisaris independen pada BUMN yang menjadi sampel penelitian mencapai 44,14%. Standar deviasi sebesar 10,44% menunjukkan bahwa nilai dewan komisaris independen mempunyai persebaran yang cukup baik. Berdasarkan nilai rata-rata variabel dewan komisaris independen dapat diketahui bahwa perusahaan sampel penelitian memiliki proporsi dewan komisaris independen lebih dari 30% dan telah memenuhi peraturan BEJ.

3. Dewan Direksi

Dewan Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan serta mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan. Tugas dan tanggung jawab dewan direksi merupakan tugas dan tanggung jawab sesama anggota direksi terhadap perusahaan.

Tabel 8 Jumlah Dewan Direksi Perusahaan Sampel Tahun 2014-2016

| NO | KODE PERUSAHAAN | Jumlah Dewan Direksi | | |
|------------------------|-----------------|----------------------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | ADHI | 6 | 6 | 6 |
| 2 | PTPP | 6 | 6 | 6 |
| 3 | WIKA | 6 | 7 | 6 |
| 4 | BBNI | 10 | 9 | 10 |
| 5 | BBRI | 11 | 11 | 11 |
| 6 | BBTN | 6 | 8 | 8 |
| 7 | BMRI | 11 | 11 | 10 |
| 8 | PTBA | 6 | 6 | 6 |
| 9 | TINS | 6 | 6 | 4 |
| 10 | SMGR | 7 | 7 | 7 |
| 11 | JSMR | 5 | 6 | 6 |
| 12 | TLKM | 8 | 8 | 9 |
| Nilai Tertinggi | | 11 | 11 | 11 |
| Nilai Terendah | | 5 | 6 | 4 |
| Std. Deviation | | 2,15 | 1,88 | 2,15 |
| Jumlah Sample | | 36 | | |

Sumber: Data sekunder diolah. 2018

Tabel 8 di atas menunjukkan informasi bahwa nilai DD tertinggi pada tahun 2014 yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) dan PT Bank Mandiri (BMRI) sebesar 11 dan nilai DD terendah yaitu PT Jasa Marga (JSMR) sebesar 5. Pada tahun 2015 nilai DD tertinggi yaitu PT Bank Negara Indonesia (BBNI) dan PT Bank Mandiri (BMRI) sebesar 11 dan nilai DD terendah yaitu PT Adhi Karya (ADHI), PT Pembangunan Perumahan (PTPP), PT Bukit Asam (PTBA), PT Timah (TINS) dan PT Jasa Marga (JSMR) masing-masing sebesar 6. Pada tahun 2016 nilai DD tertinggi yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) sebesar 11 dan nilai DD terendah yaitu PT Timah (TINS) sebesar 4. Standar deviasi variabel dewan direksi sebesar 2,01 menunjukkan nilai dewan direksi mempunyai persebaran yang cukup baik. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa perusahaan

BUMN memiliki jumlah dewan direksi lebih dari 3 orang dan telah memenuhi peraturan OJK yang menyatakan bahwa dewan direksi dalam suatu perusahaan paling kurang terdiri dari dua orang anggota direksi.

4. Komite Audit

Komite audit merupakan pihak yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan dan juga merupakan pihak yang menghubungkan antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani pengendalian.

Tabel 9 Jumlah Komite Audit Perusahaan Sampel Tahun 2014-2016

| NO | KODE PERUSAHAAN | Jumlah Dewan Direksi | | | |
|----|-----------------|----------------------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1 | ADHI | 3 | 3 | 5 | |
| 2 | PTPP | 4 | 3 | 3 | |
| 3 | WIKA | 6 | 6 | 4 | |
| 4 | BBNI | 3 | 5 | 3 | |
| 5 | BBRI | 6 | 6 | 6 | |
| 6 | BBTN | 4 | 3 | 3 | |
| 7 | BMRI | 6 | 5 | 6 | |
| 8 | PTBA | 4 | 4 | 3 | |
| 9 | TINS | 4 | 4 | 5 | |
| 10 | SMGR | 5 | 4 | 4 | |
| 11 | JSMR | 3 | 3 | 3 | |
| 12 | TLKM | 5 | 4 | 6 | |
| | Nilai Tertinggi | 6 | 6 | 6 | |
| | Nilai Terendah | 3 | 3 | 3 | |
| | Std. Deviation | 1,30 | 1,12 | 1,29 | 1,20 |
| | Jumlah Sample | 36 | | | |

Sumber: Data sekunder diolah. 2018

Berdasarkan tabel 9 di atas menunjukkan informasi bahwa nilai KA tertinggi pada tahun 2014 yaitu PT Wijaya Karya (WIKA) PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) dan PT Bank Mandiri (BMRI) sebesar 6 dan nilai KA terendah yaitu PT Adhi Karya (ADHI) sebesar 2. Pada tahun 2015 nilai KA tertinggi yaitu PT Wijaya Karya (WIKA) dan PT Bank Negara Indonesia (BBNI) sebesar 6 dan nilai KA terendah yaitu PT Adhi Karya (ADHI), PT Pembangunan Perumahan (PTPP), PT Bank Tabungan Negara (BBTN) dan PT Jasa Marga (JSMR) masing-masing sebesar 3. Pada tahun 2016 nilai KA tertinggi yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) PT Bank Mandiri (BMRI) dan PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM) sebesar 6 dan nilai terendah yaitu PT Pembangunan Perumahan (PTPP), PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Tabungan Negara (BBTN) PT Bukit Asam (PTBA) dan PT Jasa Marga (JSMR) masing-masing sebesar 3. Standar deviasi variabel komite audit sebesar 1,20416 menunjukkan nilai komite audit mempunyai persebaran yang cukup baik. Dari tabel tersebut menunjukkan perusahaan BUMN memiliki jumlah komite audit sebanyak empat orang atau lebih dan telah memenuhi peraturan yang diterapkan oleh Bapepam yaitu tiga orang komite audit.

5. *Return On Asset (ROA)*

Return on Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang menggambarkan kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia dalam perusahaan (Syamsuddin, 2013:63).

Tabel 4 Nilai ROA Perusahaan Sampel Tahun 2014-2016 (%)

| No. | Kode | ROA | | | Rata-Rata |
|-----|------------------------|-------|-------|-------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1 | ADHI | 5,68 | 4,45 | 3,05 | 4,39 |
| 2 | PTPP | 6,32 | 6,72 | 5,45 | 6,16 |
| 3 | WIKA | 5,36 | 3,83 | 3,96 | 4,38 |
| 4 | BBNI | 3,25 | 2,25 | 2,37 | 2,62 |
| 5 | BBRI | 3,84 | 3,70 | 3,39 | 3,64 |
| 6 | BBTN | 1,09 | 1,48 | 1,55 | 1,38 |
| 7 | BMRI | 3,04 | 2,90 | 1,79 | 2,58 |
| 8 | PTBA | 16,24 | 15,77 | 14,52 | 15,51 |
| 9 | TINS | 10,41 | 1,81 | 4,35 | 5,52 |
| 10 | SMGR | 20,80 | 15,58 | 16,15 | 17,51 |
| 11 | JSMR | 5,81 | 5,63 | 16,22 | 9,22 |
| 12 | TLKM | 20,30 | 18,86 | 21,26 | 20,14 |
| | Nilai Tertinggi | 20,80 | 18,86 | 21,26 | |
| | Nilai Terendah | 1,09 | 1,48 | 1,55 | |
| | Rata-rata | 8,51 | 6,92 | 7,84 | 7,76 |
| | Std. Deviation | 6,86 | 6,16 | 7,04 | 6,54 |
| | Jumlah Sampel | 36 | | | |

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Variabel *Return On Asset* (ROA) merupakan salah rasio profitabilitas. Berdasarkan data dari tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata ROA tertinggi pada tahun 2014-2016 terdapat pada PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM) dengan nilai 20,14% dari perusahaan-perusahaan sampel selama periode 2014-2016. Nilai ROA tertinggi pada tahun 2014 yaitu PT Semen Indonesia (SMGR) sebesar 20,80% dan nilai ROA terendah yaitu PT Bank Tabungan Negara (BBTN) sebesar 1,09%. Pada tahun 2015 nilai ROA tertinggi yaitu PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM) sebesar 18,86% dan nilai ROA terendah yaitu PT Bank Tabungan Negara (BBTN) sebesar 1,48%. Pada tahun

2016 nilai ROA tertinggi yaitu PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM) sebesar 21,26% dan nilai ROA terendah yaitu PT Bank Tabungan Negara (BBTN) sebesar 1,55%. Nilai rata-rata ROA adalah sebesar 7,76%. Standar deviasi 6,54% menunjukkan bahwa nilai standar deviasi jauh tersebar dari nilai rata-rata atau memiliki penyebaran yang tinggi. Nilai rata-rata ROA terendah pada tahun 2014-2016 yaitu PT. Bank Tabungan Negara (BBTN) sebesar 1,09%, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel tersebut kurang mampu menggunakan aset yang dimiliki secara efektif dalam menghasilkan laba.

6. Return On Equity (ROE)

Tabel 5 Nilai ROE Perusahaan Sampel Tahun 2014-2016 (%)

| No. | Kode | ROE | | | Rata-Rata |
|------------------------|------|-------|-------|-------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1 | ADHI | 18,65 | 9,01 | 5,79 | 11,15 |
| 2 | PTPP | 22,87 | 16,42 | 10,67 | 16,65 |
| 3 | WIKA | 15,25 | 12,93 | 9,18 | 12,45 |
| 4 | BBNI | 17,75 | 11,65 | 12,78 | 14,06 |
| 5 | BBRI | 24,80 | 22,46 | 17,86 | 21,71 |
| 6 | BBTN | 9,35 | 13,35 | 13,69 | 12,13 |
| 7 | BMRI | 19,70 | 17,70 | 9,55 | 15,65 |
| 8 | PTBA | 21,86 | 21,93 | 19,18 | 20,99 |
| 9 | TINS | 14,96 | 1,89 | 5,01 | 7,28 |
| 10 | SMGR | 22,27 | 16,49 | 14,83 | 17,86 |
| 11 | JSMR | 11,22 | 10,67 | 11,04 | 10,98 |
| 12 | TLKM | 31,41 | 31,03 | 34,57 | 32,34 |
| Nilai Tertinggi | | 31,41 | 31,03 | 34,57 | |
| Nilai Terendah | | 9,35 | 1,89 | 5,01 | |
| Rata-rata | | 19,17 | 15,46 | 13,68 | 16,11 |
| Std. Deviation | | 6,09 | 7,48 | 7,85 | 7,34 |
| Jumlah Sampel | | 36 | | | |

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Return On Equity (ROE) merupakan kemampuan perusahaan dalam memberikan pengembalian atas investasi dari para pemegang saham perusahaan. Menurut Sudana (2009:26), ROE menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri.

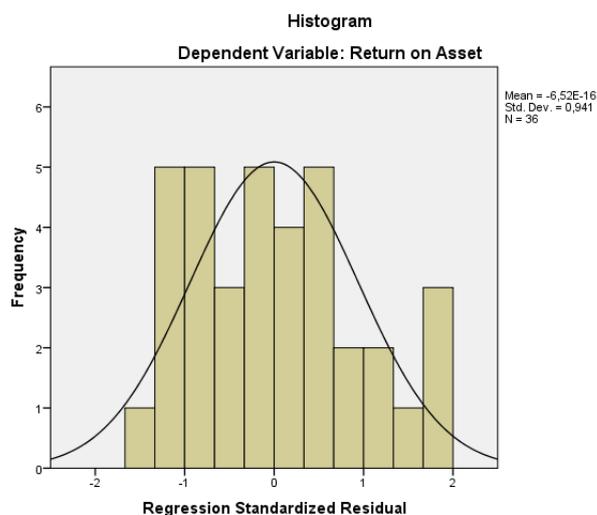
Variabel *Return On Equity* (ROE) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Berdasarkan data dari tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata ROE tertinggi pada tahun 2014-2016 terdapat pada PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM) dengan nilai 32,34% dari perusahaan-perusahaan sampel selama periode 2014-2016. Nilai ROE tertinggi pada tahun 2014 yaitu PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM) sebesar 31,41% dan nilai ROE terendah yaitu PT Bank Tabungan Negara (BBTN) sebesar 9,35%. Pada tahun 2015 nilai ROE tertinggi yaitu PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM) sebesar 32,03% dan nilai ROE terendah yaitu PT Timah sebesar 1,89%. Pada tahun 2016 nilai ROE tertinggi yaitu PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM) sebesar 34,57% dan nilai ROE terendah yaitu PT Timah sebesar 5,01%. Nilai rata-rata ROE adalah sebesar 16,10%. Standar deviasi 7,34% menunjukkan bahwa nilai standar deviasi jauh tersebar dari nilai rata-rata atau memiliki penyebaran yang tinggi. Nilai rata-rata ROE terendah pada tahun 2014-2016 yaitu PT. Timah (TINS) sebesar 7,28%, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel tersebut kurang mampu menggunakan modal yang dimiliki secara efektif dalam menghasilkan laba.

C. Hasil Uji Asumsi Klasik

Model regresi dikatakan baik jika memenuhi persyaratan lolos uji asumsi klasik, yaitu variabel terdistribusi normal, variabel tidak mengandung multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji asumsi klasik pada penelitian ini meliputi uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

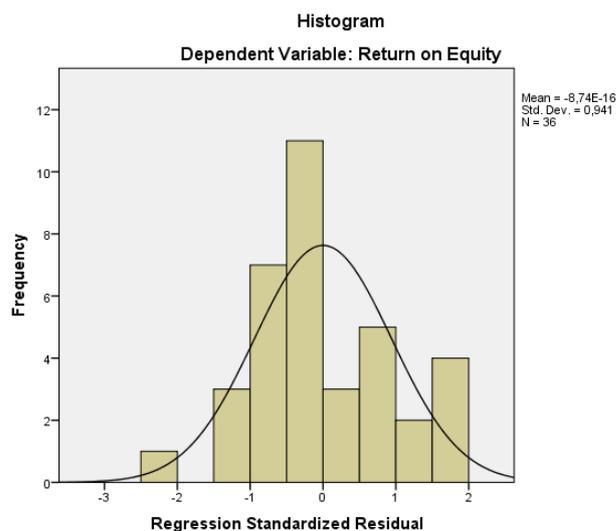
1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel independen yaitu komite audit, dewan direksi, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional mempunyai distribusi normal, mendekati normal, atau tidak terhadap variabel dependen yaitu ROA dan ROE. Pengujian normalitas dalam penelitian ini adalah menggunakan grafik histogram, grafik *Normal Probability Plot* dan pengujian one sample Kolmogorov-Smirnov test yang ditentukan berdasarkan taraf signifikansi hasil hitung. Taraf signifikansi yang di atas 0,05 menunjukkan bahwa data terdistribusi normal, sebaliknya jika taraf signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut:



Gambar 3 Uji Normalitas (Histogram) Model 1

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

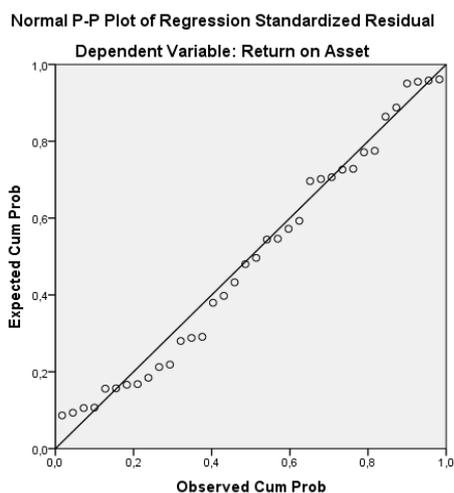


Gambar 4 Uji Normalitas (Histogram) Model 2

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

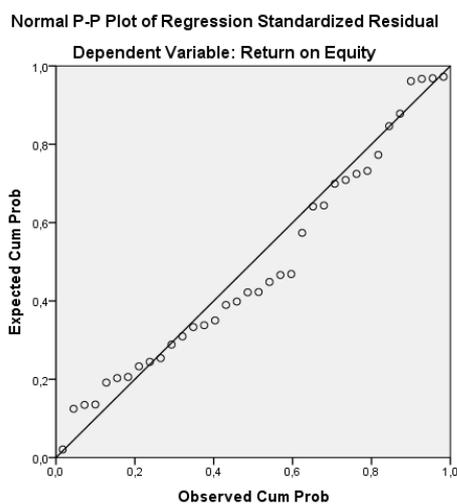
Pada gambar 3 dan 4 menunjukkan pola lonceng, artinya pada grafik tersebut memberikan pola yang distribusi yang normal. Sehingga berdasarkan gambar 3 dan 4, dapat disimpulkan bahwa data memiliki distribusi normal dan dapat digunakan untuk pengujian model selanjutnya. Selain pengujian normalitas menggunakan grafik histogram, dapat juga

dilihat melalui grafik *Normal P-Plot of Regression Standardized Residual* berikut ini:



Gambar 5 Uji Normalitas (*Normal P-Plot of Regression Standardized Residual*) Model 1

Sumber: Data sekunder diolah, 2018



Gambar 6 Uji Normalitas (*Normal P-Plot of Regression Standardized Residual*) Model 2

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Gambar 5 dan 6 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar disekitar diagonal dan mengikuti garis diagonal, sehingga variabel independen dan variabel dependen memenuhi asumsi normalitas. Model ini layak digunakan

untuk analisis selanjutnya. Pengujian normalitas dan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan taraf signifikansi 0,05 sebagai berikut:

Tabel 10 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| N | | 36 | 36 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 | ,0000000 |
| | Std. Deviation | 4,95309159 | 5,67610679 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,110 | ,144 |
| | Positive | ,110 | ,144 |
| | Negative | -,074 | -,083 |
| Test Statistic | | ,110 | ,144 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,200 ^{c,d} | ,066 ^c |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 10, pada model 1 (RES_1) besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov yaitu sebesar 0,110 dan menunjukkan probabilitas *asymp.sig (2-tailed)* > 0,05 yaitu sebesar 0,200. Sedangkan, pada model 2 (RES_2) besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov yaitu sebesar 0,144 dan menunjukkan probabilitas *asymp.sig (2-tailed)* > 0,05 yaitu sebesar 0,066. Hasil tersebut menunjukkan bahwa taraf signifikansi pada kedua model

lebih besar dari nilai *level of significant* yang ditentukan yaitu 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi normal dan pengujian regresi dengan model regresi linier berganda dapat dilakukan.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan antar variabel independen. Model regresi bebas multikolinieritas terlihat pada nilai *tolerance value* (TOL) di atas 0,1 atau nilai *variance inflation factor* (VIF) di bawah 10. Berikut adalah tabel coefficients yang menunjukkan hasil uji multikolinieritas.

Tabel 11 Uji Multikolinieritas Model 1

| Model | | Collinearity Statistics | |
|-------|----------------------------|-------------------------|-------|
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | Kepemilikan Institusional | ,649 | 1,542 |
| | Dewan Komisaris Independen | ,493 | 2,030 |
| | Dewan Direksi | ,373 | 2,682 |
| | Komite Audit | ,773 | 1,293 |

a. Dependent Variable: Return on Asset
Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 11, nilai *tolerance* variabel komite audit, dewan direksi, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional lebih dari 0,1. Hasil pengujian juga menunjukkan masing-masing variabel kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 12 Uji Multikolinieritas Model 2

Coefficients^a

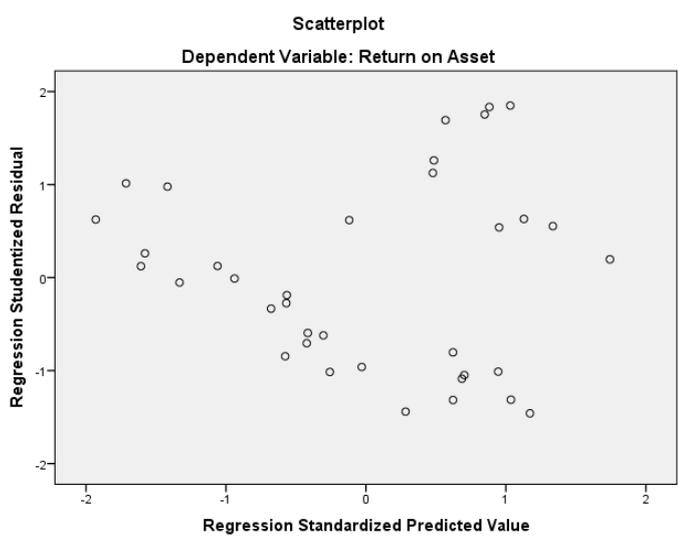
| Model | | Collinearity Statistics | |
|-------|----------------------------|-------------------------|-------|
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | Kepemilikan Institusional | ,649 | 1,542 |
| | Dewan Komisaris Independen | ,493 | 2,030 |
| | Dewan Direksi | ,373 | 2,682 |
| | Komite Audit | ,773 | 1,293 |

a. Dependent Variable: Return on Equity
 Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 12, nilai *tolerance* variabel komite audit, dewan direksi, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional lebih dari 0,1. Hasil pengujian juga menunjukkan masing-masing variabel kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

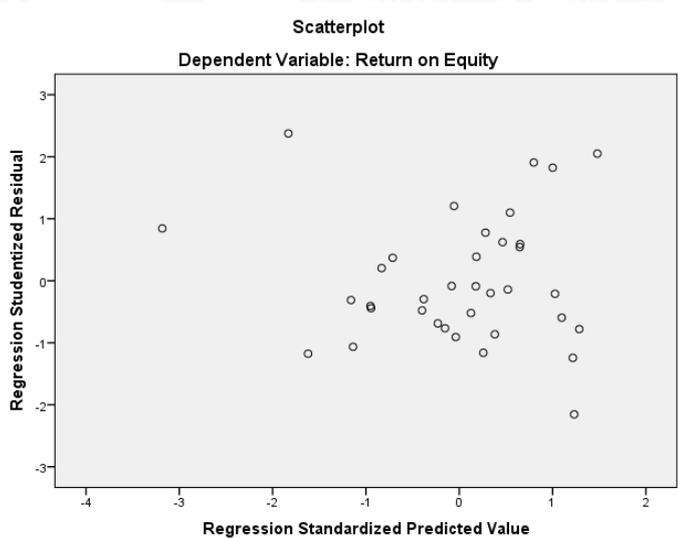
3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan varians residual yang tidak sama pada semua pengamatan dalam model regresi. Regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu dan teratur maka menunjukkan terjadinya heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka pola tersebut menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas.



Gambar 7 Uji Heteroskedastisitas (*Scatterplot*) Model 1

Sumber: Data sekunder diolah, 2018



Gambar 8 Uji Heteroskedastisitas (*Scatterplot*) Model 2

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan hasil *scatterplot* pada gambar 7 dan 8 menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas. Titik-titik menyebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y, maka disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode $t-1$. Adanya autokorelasi dapat ditunjukkan dengan melakukan pengujian Durbin-Watson. Hasil pengujian dapat dilihat dari *model summary* yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 13 Uji Autokorelasi Model 1

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | ,653 ^a | ,426 | ,352 | 5,26295 | 2,049 |

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi

b. Dependent Variable: Return on Asset
Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 13 menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam data penelitian. Nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2,049 sedangkan nilai d_L dan d_U yang diperoleh dari tabel ($n = 36$, $k = 4$) adalah sebesar 1,236 dan 1,724. Nilai DW adalah 2,049 dan berada di antara d_U dan $4-d_U$. Artinya 2,049 lebih dari d_U (1,724) dan kurang dari $4-d_U$ (2,276), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model sehingga model regresi layak dipakai untuk analisis selanjutnya.

Tabel 14 Uji Autokorelasi Model 2**Model Summary^b**

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | ,634 ^a | ,403 | ,325 | 6,03120 | 2,048 |

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi

b. Dependent Variable: Return on Equity

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 14 menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam data penelitian. Nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2,008 sedangkan nilai dL dan dU yang diperoleh dari tabel ($n = 36$, $k = 4$) adalah sebesar 1,236 dan 1,724. Nilai DW adalah 2,008 dan berada di antara dU dan $4-dU$. Artinya 2,008 lebih dari dU (1,724) dan kurang dari $4-dU$ (2,276), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model sehingga model regresi layak dipakai untuk analisis selanjutnya.

D. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap profitabilitas perusahaan. Mekanisme GCG dalam penelitian ini diprosikan dengan komite audit, dewan direksi, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan *software IBM SPSS versi 24.00 for Windows*, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 15 Analisis Regresi Linier Berganda Model 1

| Variabel | Standardized Coefficients Beta | T | Sig. |
|-----------------------------|--------------------------------|--------|-------|
| Kepemilikan Institusional | 0,417 | 2,470 | 0,019 |
| Dewan Komisaris Independen | -0,633 | -3,263 | 0,003 |
| Dewan Direksi | -0,071 | -0,320 | 0,751 |
| Komite Audit | 0,255 | 1,645 | 0,110 |
| R ² : 0,426 | | | |
| Adj. R ² : 0,352 | | | |
| N : 36 | | | |

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Secara matematis hasil dari analisis regresi linier berganda tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{ROA} = 0,417 KI - 0,633 DKI - 0,071 DD + 0,255 KA$$

Pada persamaan di atas menunjukkan pengaruh variabel independent (X) terhadap variabel dependen (Y). Berikut arti koefisien regresi dari setiap variabel dalam penelitian yang dilakukan:

a) Koefisien Regresi Kepemilikan Institusional (KI)

Nilai koefisien regresi dari variabel kepemilikan institusional yaitu sebesar 0,417. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila kepemilikan institusional mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka ROA akan naik sebesar 0,417 dengan asumsi variabel lain dalam penelitian dianggap nol.

b) Koefisien Regresi Dewan Komisaris Independen (DKI)

Nilai koefisien regresi dari variabel dewan komisaris independen yaitu sebesar 0,633. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila dewan komisaris independen mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka ROA akan turun sebesar 0,633 dengan asumsi variabel lain dalam penelitian dianggap nol.

c) Koefisien Regresi Dewan Direksi (DD)

Nilai koefisien regresi dari variabel dewan direksi yaitu sebesar 0,071. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila dewan direksi mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka ROA akan turun sebesar 0,071 dengan asumsi variabel lain dalam penelitian dianggap nol.

d) Koefisien Regresi Komite Audit (KA)

Nilai koefisien regresi dari variabel komite audit yaitu sebesar 0,255. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila komite audit mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka ROA akan naik sebesar 0,255, dengan asumsi variabel lain dalam penelitian dianggap nol.

Tabel 16 Analisis Regresi Linier Berganda Model 2

| Variabel | Standardized Coefficients Beta | T | Sig. |
|-----------------------------|--------------------------------|--------|-------|
| Kepemilikan Institusional | 0,359 | 2,083 | 0,046 |
| Dewan Komisaris Independen | -0,434 | -2,194 | 0,036 |
| Dewan Direksi | 0,427 | 1,880 | 0,070 |
| Komite Audit | 0,181 | 1,150 | 0,259 |
| R ² : 0,403 | | | |
| Adj. R ² : 0,325 | | | |
| N : 36 | | | |

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Secara matematis hasil dari analisis regresi linier berganda tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{ROE} = 0,359 KI - 0,434 DKI + 0,427 DD + 0,181 KA$$

Pada persamaan di atas menunjukkan pengaruh variabel independent (X) terhadap variabel dependen (Y). Berikut arti koefisien regresi dari setiap variabel dalam penelitian yang dilakukan:

a) Koefisien Regresi Kepemilikan Institusional (KI)

Nilai koefisien regresi dari variabel kepemilikan institusional yaitu sebesar 0,359. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila kepemilikan institusional mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka ROE akan naik sebesar 0,359 dengan asumsi variabel lain dalam penelitian dianggap nol.

b) Koefisien Regresi Dewan Komisaris Independen (DKI)

Nilai koefisien regresi dari variabel dewan komisaris independen yaitu sebesar 0,434. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila dewan komisaris

independen mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka ROE akan turun sebesar 0,434 dengan asumsi variabel lain dalam penelitian dianggap nol.

c) Koefisien Regresi Dewan Direksi (DD)

Nilai koefisien regresi dari variabel dewan direksi yaitu sebesar 0,427. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila dewan direksi mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka ROE akan naik sebesar 0,427 dengan asumsi variabel lain dalam penelitian dianggap nol.

d) Koefisien Regresi Komite Audit (KA)

Nilai koefisien regresi dari variabel komite audit yaitu sebesar 0,181. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila komite audit mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka ROE akan naik sebesar 0,181, dengan asumsi variabel lain dalam penelitian dianggap nol.

E. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan langkah-langkah yang bertujuan untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Hipotesis dalam penelitian ini berjumlah dua hipotesis. Secara rinci hasil pengujian hipotesis dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Uji Hipotesis 1

Tabel 17 Uji t Statistik Model 1

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -33,056 | 18,252 | | -1,811 | ,080 |
| | Kepemilikan Institusional | ,562 | ,228 | ,417 | 2,470 | ,019 |
| | Dewan Komisaris Independen | -,396 | ,121 | -,633 | -3,263 | ,003 |
| | Dewan Direksi | -1,785 | 5,574 | -,071 | -,320 | ,751 |
| | Komite Audit | 5,709 | 3,470 | ,255 | 1,645 | ,110 |

a. Dependent Variable: Return on Asset

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Hasil dari perhitungan uji t statistik (uji parsial) pada model 1 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap ROA

Kepemilikan institusional menunjukkan nilai positif mengansumsikan jika ketiadaan dari variabel-variabel independen lainnya, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang positif antara kepemilikan institusional terhadap ROA, dimana kenaikan kepemilikan institusional akan berakibat pada kenaikan ROA. Pengujian variabel kepemilikan institusional terhadap ROA menunjukkan nilai t_{hitung} (DKI) = 2,470 lebih besar dari t_{tabel} = 2,032 dan nilai signifikansi (sig.) sebesar $0,019 < 0,05$ hasil ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa

kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA **diterima**.

b. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap ROA

Dewan komisaris independen menunjukkan nilai negatif mengansumsikan jika ketiadaan dari variabel-variabel independen lainnya, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang negatif antara dewan komisaris independen terhadap ROA, dimana kenaikan dewan komisaris independen akan berakibat pada penurunan ROA. Pengujian variabel dewan komisaris independen terhadap ROA menunjukkan nilai t_{hitung} (DKI) = -3,263 lebih kecil dari t_{tabel} = -2,032 dan nilai signifikansi (sig.) sebesar $0,003 < 0,05$ hasil ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA **diterima**.

c. Pengaruh Dewan Direksi terhadap ROA

Dewan direksi menunjukkan nilai negatif mengansumsikan jika ketiadaan dari variabel-variabel independen lainnya, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang negatif antara dewan direksi terhadap ROA, dimana kenaikan dewan direksi akan berakibat pada penurunan ROA. Pengujian variabel dewan direksi terhadap ROA menunjukkan nilai t_{hitung} (DD) = -0,320 lebih besar dari t_{tabel} = -2,032 dan nilai signifikansi (sig.) sebesar $0,751 > 0,05$ hasil ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa dewan

direksi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA **ditolak**.

d. Pengaruh Komite Audit terhadap ROA

Komite audit menunjukkan nilai positif mengansumsikan jika ketiadaan dari variabel-variabel independen lainnya, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang positif antara komite audit terhadap ROA, dimana kenaikan komite audit akan berakibat pada kenaikan ROA. Pengujian variabel komite audit terhadap ROE menunjukkan nilai $t_{hitung} (KA) = 1,645$ lebih kecil dari $t_{tabel} = 2,032$ dan nilai signifikansi (sig.) sebesar $0,110 > 0,05$ hasil ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA **ditolak**.

Tabel 18 Uji F Statistik Model 1

ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1 | Regression | 637,702 | 4 | 159,426 | 5,756 | ,001 ^b |
| | Residual | 858,659 | 31 | 27,699 | | |
| | Total | 1496,361 | 35 | | | |

a. Dependent Variable: Return on Asset

b. Predictors: (Constant) Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit.

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Untuk menguji signifikansi dari koefisien determinasi yang menggambarkan adanya pengaruh secara simultan atau serempak dari variabel-variabel independent yang terdiri dari kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi dan komite audit terhadap

variabel dependen yaitu *Return on Asset* (ROA), dapat diuji dengan menggunakan uji F statistik. Pada model 1, variabel independen yang berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam model regresi dapat dijadikan alat prediksi. Hasil uji F statistik pada tabel 23 menunjukkan nilai $F_{hitung} = 5,756$ lebih dari nilai $F_{tabel(0,05)(4,31)} = 2,680$ dan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ hasil ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa komite audit, dewan direksi, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA **diterima**.

2. Uji Hipotesis 2

Tabel 19 Uji t Statistik Model 2

| Model | | Coefficients ^a | | | | |
|-------|----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -52,537 | 20,916 | | -2,512 | ,017 |
| | Kepemilikan Institusional | ,543 | ,261 | ,359 | 2,083 | ,046 |
| | Dewan Komisaris Independen | -,305 | ,139 | -,434 | -2,194 | ,036 |
| | Dewan Direksi | 12,006 | 6,388 | ,427 | 1,880 | ,070 |
| | Komite Audit | 4,573 | 3,976 | ,181 | 1,150 | ,259 |

a. Dependent Variable: Return on Equity
Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Hasil dari perhitungan uji t statistik (uji parsial) pada model 2 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap ROE

Kepemilikan institusional menunjukkan nilai positif mengansumsikan jika ketiadaan dari variabel-variabel independen lainnya, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang positif antara kepemilikan institusional terhadap ROE, dimana kenaikan kepemilikan institusional akan berakibat pada kenaikan ROE. Pengujian variabel kepemilikan institusional terhadap ROE menunjukkan nilai t_{hitung} (DKI) = 2,083 lebih besar dari t_{tabel} = 2,032 dan nilai signifikansi (sig.) sebesar $0,046 < 0,05$ hasil ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROE **diterima**.

b. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap ROE

Dewan komisaris independen menunjukkan nilai negatif mengansumsikan jika ketiadaan dari variabel-variabel independen lainnya, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang negatif antara dewan komisaris independen terhadap ROE, dimana kenaikan dewan komisaris independen akan berakibat pada penurunan ROE. Pengujian variabel dewan komisaris independen terhadap ROE menunjukkan nilai t_{hitung} (DKI) = -2,194 lebih kecil dari t_{tabel} = -2,032 dan nilai signifikansi (sig.) sebesar $0,036 < 0,05$ hasil ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROE **diterima**.

c. Pengaruh Dewan Direksi terhadap ROE

Dewan direksi menunjukkan nilai positif mengansumsikan jika ketiadaan dari variabel-variabel independen lainnya, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang positif antara dewan direksi terhadap ROE, dimana kenaikan dewan direksi akan berakibat pada kenaikan ROE. Pengujian variabel dewan direksi terhadap ROE menunjukkan nilai $t_{hitung} (DD) = 1,880$ lebih kecil dari $t_{tabel} = 2,032$ dan nilai signifikansi (sig.) sebesar $0,070 > 0,05$ hasil ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa dewan direksi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROE **ditolak**.

d. Pengaruh Komite Audit terhadap ROE

Komite audit menunjukkan nilai positif mengansumsikan jika ketiadaan dari variabel-variabel independen lainnya, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang positif antara komite audit terhadap ROE, dimana kenaikan komite audit akan berakibat pada kenaikan ROE. Pengujian variabel komite audit terhadap ROE menunjukkan nilai $t_{hitung} (KA) = 1,150$ lebih kecil dari $t_{tabel} = 2,032$ dan nilai signifikansi (sig.) sebesar $0,259 > 0,05$ hasil ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROE **ditolak**.

Tabel 20 Uji F Statistik Model 2

| | | ANOVA ^a | | | | |
|-------|------------|--------------------|----|-------------|-------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 759,691 | 4 | 189,923 | 5,221 | ,002 ^b |
| | Residual | 1127,637 | 31 | 36,375 | | |
| | Total | 1887,327 | 35 | | | |

a. Dependent Variable: Return on Equity

b. Predictors: (Constant) Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit.

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Untuk menguji signifikansi dari koefisien determinasi yang menggambarkan adanya pengaruh secara simultan atau serempak dari variabel-variabel independent yang terdiri dari kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi dan komite audit terhadap variabel dependen yaitu *Return on Equity* (ROE), dapat diuji dengan menggunakan uji F statistik. Pada model 2, variabel independen yang berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam model regresi dapat dijadikan alat prediksi. Hasil uji F statistik pada tabel 24 menunjukkan nilai $F_{hitung} = 5,221$ lebih dari nilai $F_{tabel(0,05)(4,31)} = 2,680$ dan nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ hasil ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa komite audit, dewan direksi, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROE **diterima**.

3. Uji Hipotesis R^2

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat koefisien regresi pada model summary. Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh

kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi yang digunakan adalah nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R²*). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai *adjusted R²* yang mendekati satu berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin erat.

Tabel 21 Model Summary Model 2

| Model Summary | | | | |
|----------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .653 ^a | .426 | .352 | 5.26295 |

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 21 diketahui bahwa *adjusted R²* sebesar 0,352 atau 35,2%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa presentase pengaruh variabel independen yang terdiri dari komite audit, dewan direksi, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap variabel dependen yaitu *Return on Asset* (ROA) sebesar 35,2%. Sedangkan sisanya sebesar 64,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model.

Tabel 22 Model Summary Model 1

| Model Summary | | | | |
|----------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .634 ^a | .403 | .325 | 6.03120 |

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 22 diketahui bahwa *adjusted R²* sebesar 0,325 atau 32,5%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa presentase pengaruh variabel

independen yang terdiri dari komite audit, dewan direksi, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap variabel dependen yaitu *Return on Equity* (ROE) sebesar 32,5%. Sedangkan sisanya sebesar 67,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model.

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis baik secara simultan maupun secara parsial yang telah dilakukan pada model 1 maupun 2, maka dapat disimpulkan bahwa komite audit, dewan direksi, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROE maupun ROA. Namun, secara parsial hanya dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional yang berpengaruh signifikan terhadap ROE maupun ROA, sedangkan komite audit dan dewan direksi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE maupun ROA.

F. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) terhadap profitabilitas perusahaan BUMN yang tercatat di BEI tahun 2014-2016. Mekanisme tata kelola perusahaan dalam penelitian ini diprosikan dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit. Sedangkan profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE).

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap ROA

Berdasarkan hasil uji t statistik (uji parsial) pada model regresi dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional (KI) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA) karena nilai signifikansi kepemilikan institusional pada uji t sebesar 0,019 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari kriteria nilai signifikansi (uji t $0,019 < \text{sig t } 0,05$) dengan nilai t_{hitung} (DKI) = 2,470 lebih besar dari $t_{\text{tabel}} = 2,032$. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan perusahaan institusional yang menjadi sampel penelitian rata-rata lebih tinggi dari 80%, hal ini bisa dilihat pada tabel 6 dimana seluruh persentase kepemilikan Institusional perusahaan memiliki nilai yang tinggi dari tahun 2014-2016 dengan nilai rata-rata selama 3 tahun 95,67% sehingga presentase kepemilikan institusional yang tinggi inilah yang menjadi alasan kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Tingginya presentase kepemilikan institusional menyebabkan pengawasan dari pihak pemegang saham institusi semakin ketat yang akan berdampak pada semakin tinggi tekanan institusi terhadap manajer untuk memaksimalkan profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROA.

Mengacu pada teori agensi atau *agency theory* menurut Jensen dan Mecking (1976) dalam (Hardjono dan Magasari, 2016) peran kepemilikan institusional mampu meminimalisir terjadinya *agency conflict* yang terjadi antara agent (manajer) dan principals (pemegang saham). Kepemilikan saham institusional dianggap mampu dalam pengawasan yang efektif untuk setiap

kegiatan investasi yang dilakukan sehingga mengurangi potensi kecurangan dan menunjukkan tingkat profitabilitas perusahaan yang sebenarnya dihasilkan. Hasil ini juga didukung oleh teori stakeholders atau *stakeholders theory* yang disampaikan Hamdani (2016:37) menyatakan bahwa *stakeholder* termasuk para pemegang saham mayoritas memiliki hak yang dilindungi oleh Undang-undang untuk ikut membuat kerangka tata kelola yang baik untuk pencapaian stabilitas. Apabila semakin banyak pemegang saham mayoritas institusi maka akan menghasilkan kinerja saham yang baik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hisamuddin dan Tirta (2012) dan Purno (2013) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ROA. Kepemilikan institusional yang semakin tinggi akan mampu memonitor perusahaan untuk lebih meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kepemilikan institusional mayoritas menyebabkan dalam pengambilan keputusan, pemegang saham mayoritas lebih dominan memiliki kontrol kuat dalam perusahaan.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan Tertius dan Christiawan (2015) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pihak institusi sebagai pemilik saham belum efektif dalam melaksanakan kontrol dan monitoring terhadap manajemen sebagai pihak yang ditunjuk untuk mengelola perusahaan. Adanya kelemahan dalam hal monitoring menyebabkan manajemen lebih leluasa dalam mengoptimalkan kepentingan dirinya sendiri.

2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap ROA

Berdasarkan hasil uji t, menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris independen (DKI) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA) karena nilai signifikansi Dewan Komisaris Independen pada uji t sebesar 0,003 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari kriteria nilai signifikansi (uji t $0,003 < \text{sig t } 0,05$) dengan nilai $t_{\text{hitung}}(\text{DKI}) = -3,263$ lebih kecil dari $t_{\text{tabel}} = -2,032$. Seluruh perusahaan sampel penelitian telah memenuhi ketentuan BEJ bahwa persyaratan jumlah minimal dewan komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris, hal ini bisa dilihat pada tabel 7 dimana seluruh persentase dewan komisaris independen perusahaan memiliki nilai yang tinggi dari tahun 2014-2016 dengan nilai rata-rata selama 3 tahun 44,15% sehingga presentase kepemilikan institusional yang tinggi inilah yang menjadi alasan dewan komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Terdapat pengaruh yang negatif signifikan antara dewan komisaris independen terhadap ROA. Pengangkatan dewan komisaris independen dianggap telah tepat dan tidak hanya sebagai pelengkap dari Dewan Komisaris di perusahaan BUMN, dengan secara optimal melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Dewan Komisaris seperti yang diatur di dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015. Hasil penelitian ini sejalan dengan Hisamuddin dan Tirta (2012), Tertius dan Christiawan (2015) yang menunjukkan dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan Purno (2013) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan tidak menjamin bahwa profitabilitas perusahaan semakin baik dan tidak terjadi kecurangan dalam pelaporan keuangan perusahaan. Adanya monitoring dari dewan komisaris independen tidak dapat menghalangi manajer untuk memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri sehingga target perusahaan untuk memaksimalkan kepentingan dirinya sehingga target perusahaan untuk memaksimalkan profitabilitas perusahaan sulit dicapai karena perbedaan kepentingan.

3. Pengaruh Dewan Direksi Terhadap ROA

Berdasarkan hasil uji statistik (uji parsial) pada model regresi dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa variabel dewan direksi (DD) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA) karena nilai signifikansi Dewan Direksi pada uji t sebesar 0,751 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari kriteria nilai signifikansi (uji t $0,751 > sig t 0,05$) dengan nilai t_{hitung} (DKI) = -0,320 lebih besar dari $t_{tabel} = -2,032$. Dalam hal ini jumlah dari dewan direksi perusahaan tidak dapat mempengaruhi besar kecilnya ROA. Pada tabel 8 terlihat bahwa jumlah dewan direksi yang tinggi ternyata tidak menjadi jaminan berpengaruh terhadap profitabilitas, jumlah dewan direksi yang tinggi justru berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas. Dewan direksi belum mampu melakukan

koordinasi serta pengambilan keputusan yang tepat dalam menjalankan fungsi kontrol yang lebih baik untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widagdo dan Chariri (2014) yang menunjukkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap ROA.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan Purno (2013) yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap ROA. Jumlah dewan direksi yang semakin banyak akan membuat tugas-tugas yang ada dalam perusahaan dapat cepat terselesaikan karena banyaknya dewan direksi yang dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Para anggota dewan direksi dapat memnuhi tugasnya dengan baik sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan.

4. Pengaruh Komite Audit Terhadap ROA

Berdasarkan hasil uji statistik (uji parsial) pada model regresi dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa variabel komite audit (KA) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA) karena nilai signifikansi Komite Audit pada uji t sebesar 0,110 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari kriteria nilai signifikansi (uji t 0,110 > sig t 0,05) dengan nilai t_{hitung} (DKI) = 1,645 lebih kecil dari t_{tabel} = 2,032. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa tinggi atau rendahnya dewan komite audit dalam suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Pada tabel 9 terlihat bahwa perusahaan kurang mementingkan proporsi komite audit, pada tabel 9 terlihat perusahaan

menempatkan komite audit hanya sebatas mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Bapepam sebanyak 3 orang sehingga jumlah komite audit yang sedikit membuat komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perusahaan, hal ini berlawanan dengan dewan direksi dimana jumlah yang semakin tinggi justru membuat tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Hasil ini mengindikasikan bahwa komite audit dalam perusahaan BUMN belum mampu secara penuh melakukan fungsi auditing sesuai keahlian untuk melihat adanya kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan untuk menganalisis profitabilitas yang bisa diperoleh perusahaan BUMN. Jumlah komite audit tidak menjamin keefektifitasan kinerja komite audit dalam melakukan pengawasan terhadap profitabilitas perusahaan. Pembentukan dari komite audit dalam suatu perusahaan hanya atas dasar memenuhi regulasi, dimana regulasi mensyaratkan bahwa perusahaan harus membentuk komite audit.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Purno (2013) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap ROA. Tidak adanya pengaruh dari jumlah komite audit dalam suatu perusahaan dikarenakan peran dari komite audit kurang optimal dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam manajemen perusahaan. Selain itu, dalam memelihara kualitas laporan keuangan dan membantu komisaris belum terpenuhi sepenuhnya oleh komite audit sehingga belum mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan. Menurut Veronica dan Utama (2005) dalam Purno (2013) menyatakan bahwa pemilihan komite audit hanya berdasarkan kedudukan dan kekerabatan sehingga

pemantauan terhadap dewan direksi tidak maksimal. Fungsi komite audit tidak berjalan optimal karena komite audit berada pada posisi yang sulit untuk bersikap independen dan objektif.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan Hasamuddin dan Tirta (2012) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap ROA. Jumlah komite audit yang semakin besar memungkinkan kualitas pelaporan semakin baik dan monitoring terhadap manajemen semakin tinggi. Komite audit berhasil mempengaruhi profitabilitas perusahaan karena semakin efektif pengawasan komite audit akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

5. Pengaruh kepemilikan Institusional, dewan komisaris Independen, dewan direksi dan komite audit secara simultan terhadap ROA

Hasil uji F statistik menunjukkan nilai $F_{hitung} = 5,756$ lebih dari nilai $F_{tabel(0,05)(4,31)} = 2,680$ dan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa komite audit, dewan direksi, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil pengujian kepemilikan institusional, komisaris independen, dewan direksi dan komite audit yang menunjukkan hasil yang positif signifikan, merupakan hasil diterapkannya kewajiban setiap perusahaan publik yang go public untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang sehat (Good Corporate Governance), dan keharusan perusahaan publik mengangkat komisaris independen dan komite audit baru ada

tahun 2001 (KEP-339/BEJ/07-2001) guna menghasilkan integritas informasi laporan keuangan yang bermutu.

Dapat dilihat dari hasil penelitian ini bahwa organ dari penerapan corporate governance yang terdiri dari proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dewan direksi dan komite audit apabila mampu menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dengan baik dan terkordinasi maka akan mampu meningkatkan profitabilitas, dalam artian sistem tata kelola perusahaan yang berjalan dengan baik akan mampu mempengaruhi besar kecilnya nilai profitabilitas perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan sumber aktiva dan sumber modal berupa utang yang dimiliki perusahaan untuk melakukan pembiayaan terhadap kegiatan operasional perusahaan juga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya profitabilitas yang diperoleh oleh perusahaan.

Profitabilitas perusahaan yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA) dihasilkan dari performa laporan keuangan yang telah diaudit oleh komite audit perusahaan perbankan yang dinilai berdasarkan kebijakan penggunaan aktiva, dan hasil perolehan rasio profitabilitas tersebut akan disampaikan kepada dewan direksi yang bertugas sebagai pengelola perusahaan. Komite audit juga menyamakan hasil laporan keuangan kepada dewan komisaris independen untuk memantau kinerja dewan direksi dalam membuat kebijakan selanjutnya berdasarkan hasil profitabilitas dari laporan keuangan tersebut. Koordinasi kinerja antara dewan komisaris independen, dewan direksi dan komite audit

kaitannya dalam menghasilkan laba dan meningkatkan kinerja keuangan dijelaskan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007.

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 menyebutkan salah satu tugas Komisaris Independen adalah bertanggung jawab melakukan fungsi pengawasan kepada para pemegang saham yang terdiri dari pemegang saham pengendali, mayoritas maupun minoritas yang diatur dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Fungsi pengawasan yang dilakukan dewan komisaris independen menyangkut dalam pengawasan penyalahgunaan hak hak pemegang saham, dan masalah benturan kepentingan antara dewan direksi dan anggota dewan komisaris. Fungsi pengawasan juga dilakukan kepada peran pembantu komite audit untuk melakukan pengendalian audit internal laporan keuangan berdasarkan pertimbangan dan risiko yang ada. Komite audit akan melakukan *monitoring* terhadap kinerja manajer keuangan dan operasional dalam melihat seberapa jauh laba yang diperoleh perusahaan.

Berdasarkan hasil dari laporan keuangan, manajer keuangan melihat perlu tidaknya menggunakan utang sebagai pembiayaan berdasarkan kondisi struktur modal sesuai dengan aktiva dan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Keputusan menggunakan utang ini dikordinasikan dengan pengelola perusahaan berdasarkan pengawasan direksi dan komite audit, sehingga pengelola perusahaan dapat melihat sejauh mana laba dapat dihasilkan. Hal inilah yang menjelaskan bahwa *corporate governance* dan struktur modal secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap *return on asset* (ROA).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Tertius dan Christiawan (2015) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit berpengaruh terhadap ROA. Terjadi persamaan pengaruh antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel bebas *corporate governance* yang diukur melalui organ didalamnya yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit.

6. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap ROE

Berdasarkan hasil uji t statistik (uji parsial) pada model regresi dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional (KI) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan *Return On Equity* (ROE) karena nilai signifikansi Komite Audit pada uji t sebesar 0,046 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari kriteria nilai signifikansi (uji t $0,046 < sig t 0,05$) dengan nilai t_{hitung} (DKI) = 2,083 lebih besar dari $t_{tabel} = 2,032$. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan perusahaan institusional yang menjadi sampel penelitian rata-rata lebih tinggi dari 80%, hal ini bisa dilihat pada tabel 6 dimana seluruh persentase kepemilikan Institusional perusahaan memiliki nilai yang tinggi dari tahun 2014-2016 presentase kepemilikan institusional yang tinggi inilah yang menjadi alasan kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Tingginya presentase kepemilikan institusional menyebabkan pengawasan dari pihak pemegang saham institusi semakin ketat yang akan berdampak pada

semakin tinggi tekanan institusi terhadap manajer untuk memaksimalkan profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROE.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nathania (2014) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ROE. Kepemilikan institusional yang semakin tinggi akan mampu memonitor perusahaan untuk lebih meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kepemilikan institusional mayoritas menyebabkan dalam pengambilan keputusan, pemegang saham mayoritas lebih dominan memiliki kontrol kuat dalam perusahaan.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Arifani (2013) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak mempengaruhi besar kecilnya ROE.

7. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap ROE

Berdasarkan hasil uji statistik (uji parsial) pada model regresi dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris independen (DKI) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan *Return On Equity* (ROE). karena nilai signifikansi Komite Audit pada uji t sebesar 0,036 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari kriteria nilai signifikansi (uji t $0,036 < sig\ t\ 0,05$) dengan nilai t_{hitung} (DKI) = -2,194 lebih besar dari $t_{tabel} = -2,032$. Seluruh perusahaan sampel penelitian telah memenuhi ketentuan BEJ bahwa persyaratan jumlah minimal dewan komisaris

independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Terdapat pengaruh yang negatif signifikan antara dewan komisaris independen terhadap ROE, hal ini bisa dilihat pada tabel 7 dimana seluruh persentase dewan komisaris independen perusahaan memiliki nilai yang tinggi dari tahun 2014-2016 dengan nilai rata-rata selama 3 tahun 44,15% sehingga persentase kepemilikan institusional yang tinggi inilah yang menjadi alasan dewan komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.. Hal ini dapat dijelaskan, semakin besar proporsi dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dengan keahlian dan pengalaman yang beragam, akan memungkinkan menyebabkan penurunan kemampuan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan karena muncul masalah koordinasi, komunikasi dan pembuatan keputusan.

Hal tersebut juga disebabkan karena peran dewan komisaris independen yang seharusnya bersikap independen dengan mengesampingkan kepentingan pribadi atau manajemen dan bertindak hanya untuk kepentingan perusahaan belum terlaksana dengan baik. Perusahaan hanya memenuhi kepatuhan tanpa mengoptimalkan peran dewan komisaris independen sebagai pengawas kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Adanya benturan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajemen seharusnya dapat diminimalisir dengan peran dewan komisaris independen. Kondisi ini juga ditegaskan dengan survei yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* dalam Boediono (2005:183) yang menyatakan bahwa besarnya kendali dari pendiri perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas menjadikan dewan komisaris tidak independen

dan tanggung jawab terhadap pengawasan menjadi tidak efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan Nathania (2014) yang menunjukkan dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap ROE.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Arifani (2013) yang menyatakan bahwa DKI berpengaruh signifikan terhadap ROE. Jika dilihat dari data penelitian, proporsi dewan komisaris independen telah sesuai dengan peraturan OJK, yaitu minimal 30%. Meskipun demikian, hal tersebut tidak berlaku jika tidak dilaksanakan sesuai dengan tugas dan/atau fungsi dewan komisaris independen. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan tidak menjamin bahwa profitabilitas perusahaan semakin baik dan tidak terjadi kecurangan dalam pelaporan keuangan perusahaan. Adanya monitoring dari dewan komisaris independen tidak dapat menghalangi manajer untuk memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri sehingga target perusahaan untuk memaksimalkan kepentingan dirinya sehingga target perusahaan untuk memaksimalkan profitabilitas perusahaan sulit dicapai karena perbedaan kepentingan.

8. Pengaruh Dewan Direksi Terhadap ROE

Berdasarkan hasil uji statistik (uji parsial) pada model regresi dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa variabel dewan direksi (DD) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan *Return On Equity* (ROE) karena nilai signifikansi Komite Audit pada uji t sebesar 0,070 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari kriteria nilai signifikansi (uji t

0,070 > sig t 0,05) dengan nilai t_{hitung} (DKI) = 1,880 lebih kecil dari t_{tabel} = 2,032. Dalam hal ini jumlah dari dewan direksi perusahaan tidak dapat mempengaruhi besar kecilnya ROE. Pada tabel 8 terlihat bahwa jumlah dewan direksi yang tinggi ternyata tidak menjadi jaminan berpengaruh terhadap profitabilitas, jumlah dewan direksi yang tinggi justru berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas. Dewan direksi belum mampu melakukan koordinasi serta pengambilan keputusan yang tepat dalam menjalankan fungsi kontrol yang lebih baik untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifani (2013) yang menunjukkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap ROE.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan Oemar (2014) yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap ROE. Jumlah dewan direksi yang semakin banyak akan membuat tugas-tugas yang ada dalam perusahaan dapat cepat terselesaikan karena banyaknya dewan direksi yang dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Para anggota dewan direksi dapat memnuhi tugasnya dengan baik sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan.

9. Pengaruh Komite Audit Terhadap ROE

Berdasarkan hasil uji statistik (uji parsial) pada model regresi dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa variabel komite audit (KA) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan *Return On Equity* (ROE) karena nilai signifikansi Komite Audit pada uji t sebesar 0,259 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari kriteria nilai signifikansi (uji t 0,259

> sig t 0,05) dengan nilai t_{hitung} (DKI) = 1,150 lebih kecil dari t_{tabel} = 2,032. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa tinggi atau rendahnya dewan komite audit dalam suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Pada tabel 9 terlihat bahwa perusahaan kurang mementingkan proporsi komite audit, pada tabel 9 terlihat perusahaan menempatkan komite audit hanya sebatas mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Bapepam sebanyak 3 orang sehingga jumlah komite audit yang sedikit membuat komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perusahaan, hal ini berlawanan dengan dewan direksi dimana jumlah yang semakin tinggi justru membuat tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Jumlah komite audit tidak menjamin keefektifitasan kinerja komite audit dalam melakukan pengawasan terhadap profitabilitas perusahaan. Pembentukan dari komite audit dalam suatu perusahaan hanya atas dasar memenuhi regulasi, dimana regulasi mensyaratkan bahwa perusahaan harus membentuk komite audit. Jumlah komite audit dalam suatu perusahaan hanya sebatas untuk mengawasi apakah proses operasional perusahaan telah berjalan sesuai dengan peraturan dan tidak berusaha untuk meningkatkan kinerja. Selain itu, pembentukan komite audit juga cenderung hanya dilakukan untuk formalitas saja untuk memenuhi regulasi dari pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Purno (2013) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap ROE. Tidak adanya pengaruh dari jumlah komite audit dalam suatu perusahaan dikarenakan peran dari komite audit kurang optimal dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian

dalam manajemen perusahaan. Selain itu, dalam memelihara kualitas laporan keuangan dan membantu komisaris belum terpenuhi sepenuhnya oleh komite audit sehingga belum mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Menurut Oemar (2014) menyatakan bahwa pemilihan komite audit hanya berdasarkan kedudukan dan kekerabatan sehingga pemantauan terhadap dewan direksi tidak maksimal. Fungsi komite audit tidak berjalan optimal karena komite audit berada pada posisi yang sulit untuk bersikap independen dan objektif.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan Oemar (2014) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap ROE. Jumlah komite audit yang semakin besar memungkinkan kualitas pelaporan semakin baik dan monitoring terhadap manajemen semakin tinggi. Komite audit berhasil mempengaruhi profitabilitas perusahaan karena semakin efektif pengawasan komite audit akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

10. Pengaruh kepemilikan Institusional, dewan komisaris Independen, dewan direksi dan komite audit secara simultan terhadap ROE

Hasil uji F statistik pada menunjukkan nilai $F_{hitung} = 5,221$ lebih dari nilai $F_{tabel(0,05)(4,31)} = 2,680$ dan nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa komite audit, dewan direksi, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROE diterima yang berarti variabel

independen (kepemilikan institusional, komisaris independen, dewan direksi dan komite audit) secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Hasil pengujian kepemilikan institusional, komisaris independen, dewan direksi dan komite audit yang menunjukkan hasil yang positif signifikan, merupakan hasil diterapkannya kewajiban setiap perusahaan publik yang go public untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance*), dan keharusan perusahaan publik mengangkat komisaris independen dan komite audit baru ada tahun 2001 (KEP-339/BEJ/07-2001) guna menghasilkan integritas informasi laporan keuangan yang bermutu. Menurut Sutedi (94:2012) komite audit yang terdiri dari auditor internal dan auditor external diperlukan untuk memeriksa laporan keuangan yang telah dibuat dan melihat berapa laba atau profit yang diperoleh perusahaan. Komite audit harus memastikan laporan keuangan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG), karena hal ini merupakan tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder* nya dan meminimalisir terjadinya kecurangan. Kepemilikan institusional yang sebagian besar dimiliki oleh pemegang saham mayoritas dapat memonitor peningkatan investasi yang ditanamkan secara profesional sebagai kebijakan dalam melakukan kontrol terhadap pengelolaan dana investasi dengan harapan memperoleh peningkatan keuntungan atau profit.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Widagdo dan Chariri (2014) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit berpengaruh terhadap ROE. Terjadi persamaan

pengaruh antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel bebas *Corporate Governance* yang diukur melalui organ di dalam yaitu Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, Komite Audit yang secara simultan berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap profitabilitas perusahaan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit. Variabel yang digunakan adalah *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan *software 23.0 IBM SPSS versi for windows*. Sampel penelitian diperoleh berdasarkan teknik *purposive sampling*. Jumlah sampel penelitian yang digunakan 12 perusahaan yang termasuk dalam perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016.

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap profitabilitas pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016, sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengujian hipotesis, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA). Setiap perusahaan harus

mempertimbangkan adanya kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan Komite audit dalam perusahaan.

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA. Pengaruh signifikan tersebut menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya profitabilitas perusahaan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan institusi dalam perusahaan BUMN. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara kepemilikan institusional terhadap ROA. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROA akan semakin tinggi pula.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dewan komisaris independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA. Adanya pengaruh signifikan tersebut menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya profitabilitas perusahaan dapat dipengaruhi oleh proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan BUMN. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif yang artinya terdapat pengaruh berlawanan antara proporsi dewan komisaris independen terhadap ROA. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan maka ROA perusahaan akan semakin rendah.
4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dewan direksi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Tidak adanya pengaruh yang signifikan tersebut menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya ROA tidak dipengaruhi oleh jumlah dari dewan direksi dalam perusahaan BUMN.

Dewan direksi belum mampu melakukan koordinasi, komunikasi, serta pengambilan keputusan yang tepat dalam menjalankan fungsi kontrol yang lebih baik untuk meningkatkan ROA perusahaan.

5. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, komite audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Tidak adanya pengaruh yang signifikan tersebut menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya ROA perusahaan tidak dipengaruhi oleh jumlah dari komite audit dalam perusahaan BUMN. Jumlah tidak dapat menjamin keefektifan kinerja komite audit dalam melakukan pengawasan terhadap profitabilitas perusahaan. Pembentukan dari komite audit dalam suatu perusahaan hanya atas dasar untuk perusahaan regulasi mensyaratkan bahwa perusahaan harus membentuk komite audit.
6. Berdasarkan pengujian hipotesis, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur dengan *Return On Equity* (ROE). Setiap perusahaan harus mempertimbangkan adanya kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit dalam perusahaan.
7. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROE. Pengaruh signifikan tersebut menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya profitabilitas perusahaan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan institusi dalam perusahaan BUMN. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara kepemilikan

institusional terhadap ROE. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROE akan semakin tinggi pula.

8. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dewan komisaris independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROE. Adanya pengaruh signifikan tersebut menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya profitabilitas perusahaan dapat dipengaruhi oleh proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan BUMN. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif yang artinya terdapat pengaruh berlawanan antara proporsi dewan komisaris independen terhadap ROE. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan maka ROE perusahaan akan semakin rendah.
9. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dewan direksi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. Tidak adanya pengaruh yang signifikan tersebut menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya ROE tidak dipengaruhi oleh jumlah dari dewan direksi dalam perusahaan BUMN. Dewan direksi belum mampu melakukan koordinasi, komunikasi, serta pengambilan keputusan yang tepat dalam menjalankan fungsi kontrol yang lebih baik untuk meningkatkan ROE perusahaan.
10. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, komite audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. Tidak adanya pengaruh yang signifikan tersebut menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya ROE perusahaan tidak dipengaruhi oleh jumlah dari komite audit dalam

perusahaan BUMN. Jumlah tidak dapat menjamin keefektifan kinerja komite audit dalam melakukan pengawasan terhadap profitabilitas perusahaan. Pembentukan dari komite audit dalam suatu perusahaan hanya atas dasar untuk perusahaan regulasi mensyaratkan bahwa perusahaan harus membentuk komite audit.

B. Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi. Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini, maka saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan selaku emitmen, khususnya pada perusahaan BUMN, diharapkan menjadikan hasil penelitian ini sebagai wacana untuk lebih mengoptimalkan penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan perusahaan. Penerapan mekanisme GCG yang baik dapat dijadikan strategi perusahaan dalam menarik minat para calon investor. Investor akan menilai penerapan GCG dalam suatu perusahaan sebelum investor melakukan keputusan investasi karena hanya perusahaan yang memperhatikan tata kelola yang mampu bersaing dalam dunia bisnis di era globalisasi saat ini.
2. Bagi pihak manajemen perusahaan diharapkan mampu lebih transparan dan akuntabel dalam melaporkan seluruh laporan keuangan perusahaan. Manajemen adalah pihak yang dipercaya oleh para pemegang saham dalam

mengelola perusahaan. Berbagai keputusan dan tindakan yang dibuat oleh manajemen akan menentukan jalannya operasional perusahaan dan reputasi perusahaan dikalangan *shareholders dan stakeholders*.

3. Bagi pemereintah diharapkan lebih memperhatikan peraturan mengenai penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan BUMN yang merupakan kelompok perusahaan yang dijadikan percontohan kebijakan-kebijakan pemerintah. Prosedur terstruktur dan didukung oleh peraturan undang-undang sangat penting dalam mewujudkan perusahaan yang mampu bersaing dalam jangka panjang.
4. Bagi calon investor diharapkan menggunakan aspek GCG sebagai dalam dasar pengambilan keputusan sebelum melakukan investasi. Perusahaan yang menerapkan GCG secara konsisten dapat dijadikan penilaian tentang baiknya kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang baik akan diikuti dengan baiknya kinerja keuangan perusahaan khususnya dalam menghasilkan laba perusahaan..
5. Bagi pemegang saham diharapkan lebih mampu untuk mendorong pihak manajemen dalam memperhatikan mekanisme GCG. Atas dasar GCG memungkinkan pihak-pihak dalam perusahaan dapat bertindak sesuai fungsinya sehingga para pemegang saham dapat memperoleh *Return* yang sesuai investasinya.
6. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian kembali terhadap permasalahan yang sama diharapkan untuk menambah proksi dalam mengukur mekanisme GCG dan mengukur profitabilitas perusahaan.

Mekanisme GCG yang digunakan dalam penelitian ini hanya meliputi kepemilikan institusional, dewan komisaris independe, dewan direksi, dan komite audit. Sedangkan rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini hanya *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE), yang mana dapat ditambah proksi lain dalam penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akadun. 2007. *Administrasi Perusahaan Negara*. Bandung: Alfabeta.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi Kelima. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro
- Gunawan, Muhammad Ali. 2013. *Statistik Untuk Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Parama Publishing
- Hanafi, Mamduh M. 2013. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Martono dan Agus Harjito. 2011. *Manajemen Keuangan*. Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit EKONISIA.
- Riduan dan Sunarto. 2011. *Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi, dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sartono, Agus. 2011. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sudana, I Made. 2009. *Manajemen Keuangan Teori dan Praktik*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sugiyono. 2011. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta
- Sutedi, Adrian. 2012. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsuddin, Lukman. 2013. *Manajemen Keuangan Perusahaan : Konsep Aplikasi dalam Perencanaan, Pengawasan dan Pengambilan Keputusan*. Edisi Baru. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tjager, I Nyoman, F. Antonius Alijoyo, Humphrey R. Djemat, Bambang Soembodo. 2003. *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunikasi Bisnis Indonesia*. Jakarta: PT. Prenhallindo
- Toha, Suherman. 2007. *Penelitian Masalah Hukum Tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.
- Van Horne dan John M. Wachowicz. 2005. *Prinsip-prinsip Manajemen. Keuangan*. Edisi kedua belas. Jakarta: Salemba Empat
- Zarkasyi, Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance : Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: CV. Alfabeta.

Jurnal dan Skripsi:

- Arifani, Rizky. 2013. *Pengaruh GCG Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan*. Skripsi. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.

- Arifin. 2005. Pengaruh Akuntansi Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan). *Sidang Senat Guru Besar*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Boediono, Gideon SB. 2005. Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur. Simposium Nasional Akuntansi VIII, Solo, 15-16 September 2015: 172-194. Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Bukhori, Iqbal dan Raharja. 2012. Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2010). *Diponegoro Journal of Accounting*: 1-12.
- Hanifah. 2011. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Budaya Organisasi, Komite Audit dan Audit Internal terhadap Good Corporate Governance dan Implikasinya pada Kinerja Keuangan BUMN. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2011: 291-300.
- Hisamuddin, Nur dan M. Yayang Tirta. 2012. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*: 109-138.
- Kaihatu, Thomas S. 2006. Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.8, No.1, Maret 2006: 1-9.
- Martsila, Ika Surya dan Wahyu Meiranto. 2013. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013: 1-14.
- Oemar, Fahmi. 2014. Pengaruh Corporate Governance dan Keputusan Pendanaan Perusahaan Terhadap Kinerja Profitabilitas dan Implikasinya Terhadap Harga Saham. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 11, No. 2 September 2014: 369-402.
- Purno, Bambang Listyo. 2013. *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan*. Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Malang.
- Puspitasari, Filia dan Endang Ernawati. 2010. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, Tahun 3, No. 2, Agustus 2010.

Tertius, Melia Agustina dan Yulius Jogi Christiawan. 2015. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan Pada Sektor Keuangan. *Business Accounting Review*, Vol. 3 No. 1, Januari 2015: 223-232.

Ujiyantho, Muh. Arief dan Bambang Agus Pramuka. 2007. Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba, dan Kinerja Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Unhas Makasar, 26-28 Juli 2007.

Internet:

Cadbury Committee. 1992. *Financial Aspect of Corporate Governance*. London: Gee Publishing Ltd. (<http://www.ecgi.org/codes/documents/cadbury.pdf> diakses tanggal 5 November 2017).

FCGI. 2011. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Edisi 2, Jilid II, FCGI. (<http://www.fcgi.or.id/> diakses tanggal 16 November 2017).

Kementerian BUMN. 2002. *Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN*. Jakarta: Kementerian BUMN. (<http://www.bpkp.go.id/dan/konten/299/good-corporate.bpkp> diakses tanggal 16 November 2017)

Keputusan Ketua Bapepam 24 September 2004 tentang *Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Nomor Kep-29/PM/2004*. (<http://www.atlas-coal.co.id/page/audit-comitee-charter> diakses tanggal 28 Oktober 2017)

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 Tentang *Penerapan Good Corporate governance Bagi Bank Umum*. (http://auditorinternal.com/wp-content/uploads/2010/04/pbi_8_4_2006.pdf diakses tanggal 16 November 2017)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang *Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik*. (http://ptba.co.id/public/uploads/POJK_No_33-POJK_04-2014_-_Direksi_dan_Dewan_Komisaris.pdf diakses tanggal 28 November 2017).

www.bppk.kemenkeu.go.id diakses pada 2 November 2017

www.bumn.go.id diakses pada 2 November 2017

Lampiran 1 Komposisi Kepemilikan Instiusional Perusahaan Sampel Tahun 2014-2016 (%)

| NO | KODE PERUSAHAAN | TAHUN | KEPEMILIKAN | | | Total Kepemilikan Instiusional |
|----|-----------------|-------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| | | | PEMERINTAH | Institusi lokal | Institusi Asing | |
| 1 | ADHI | 2014 | 51,00 | 24,33 | 8,66 | 83,99 |
| | | 2015 | 51,00 | 22,20 | 13,10 | 86,30 |
| | | 2016 | 51,00 | 15,80 | 15,40 | 82,20 |
| 2 | PTPP | 2014 | 51,00 | 31,21 | 14,86 | 97,07 |
| | | 2015 | 51,00 | 26,99 | 19,78 | 97,77 |
| | | 2016 | 51,00 | 22,82 | 22,11 | 95,93 |
| 3 | WIKA | 2014 | 65,05 | 14,02 | 14,42 | 93,49 |
| | | 2015 | 65,05 | 15,30 | 15,18 | 95,53 |
| | | 2016 | 65,05 | 19,17 | 10,85 | 95,07 |
| 4 | BBNI | 2014 | 60,00 | 10,09 | 28,72 | 98,81 |
| | | 2015 | 60,00 | 12,00 | 26,21 | 98,21 |
| | | 2016 | 60,00 | 8,70 | 29,40 | 98,10 |
| 5 | BBRI | 2014 | 56,75 | 5,60 | 35,67 | 98,02 |
| | | 2015 | 56,75 | 8,42 | 33,77 | 98,94 |
| | | 2016 | 56,75 | 7,51 | 34,61 | 98,87 |
| 6 | BBTN | 2014 | 60,13 | 14,46 | 20,42 | 95,01 |
| | | 2015 | 60,13 | 13,39 | 22,56 | 96,08 |
| | | 2016 | 60,13 | 10,28 | 25,86 | 96,27 |
| 7 | BMRI | 2014 | 60,00 | 7,26 | 31,88 | 99,14 |
| | | 2015 | 60,00 | 8,52 | 30,35 | 98,87 |
| | | 2016 | 60,00 | 7,60 | 31,5 | 99,10 |
| 8 | PTBA | 2014 | 65,02 | 19,70 | 13,07 | 97,79 |
| | | 2015 | 65,02 | 20,60 | 10,60 | 96,22 |
| | | 2016 | 65,02 | 24,80 | 8,00 | 97,82 |
| 9 | TINS | 2014 | 65,00 | 17,49 | 8,95 | 91,44 |
| | | 2015 | 65,00 | 16,12 | 8,16 | 89,28 |
| | | 2016 | 65,00 | 8,16 | 9,71 | 82,87 |
| 10 | SMGR | 2014 | 51,01 | 9,73 | 38,59 | 99,33 |
| | | 2015 | 51,01 | 9,47 | 38,02 | 98,50 |
| | | 2016 | 51,01 | 9,26 | 37,77 | 98,04 |
| 11 | JSMR | 2014 | 70,00 | 9,85 | 19,07 | 98,92 |
| | | 2015 | 70,00 | 12,56 | 15,90 | 98,46 |
| | | 2016 | 70,00 | 8,87 | 15,41 | 94,28 |

| NO | KODE PERUSAHAAN | TAHUN | KEPEMILIKAN | | | Total Kepemilikan Institusi |
|----|-----------------|-------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| | | | PEMERINTAH | Institusi lokal | Institusi Asing | |
| 12 | TLKM | 2014 | 52,56 | 7,24 | 39,69 | 99,49 |
| | | 2015 | 52,55 | 8,04 | 39,01 | 99,60 |
| | | 2016 | 52,09 | 7,27 | 40,07 | 99,43 |



Lampiran 2 Proporsi Dewan Komisaris Independen Perusahaan Sampel Tahun 2014-2016 (%)

| NO | KODE PERUSAHAAN | TAHUN | Jumlah Dewan Komisaris Independen | Jumlah Dewan Komisaris | Proporsi Dewan Komisaris Independen (%) |
|-----------|------------------------|--------------|--|-------------------------------|--|
| 1 | ADHI | 2014 | 2 | 6 | 33,33 |
| | | 2015 | 2 | 6 | 33,33 |
| | | 2016 | 2 | 6 | 33,33 |
| 2 | PTPP | 2014 | 2 | 5 | 40,00 |
| | | 2015 | 2 | 6 | 33,33 |
| | | 2016 | 2 | 6 | 33,33 |
| 3 | WIKA | 2014 | 2 | 5 | 40,00 |
| | | 2015 | 3 | 7 | 42,86 |
| | | 2016 | 3 | 6 | 50,00 |
| 4 | BBNI | 2014 | 4 | 8 | 50,00 |
| | | 2015 | 6 | 9 | 66,67 |
| | | 2016 | 5 | 8 | 62,50 |
| 5 | BBRI | 2014 | 5 | 8 | 62,50 |
| | | 2015 | 5 | 8 | 62,50 |
| | | 2016 | 5 | 9 | 55,56 |
| 6 | BBTN | 2014 | 3 | 6 | 50,00 |
| | | 2015 | 4 | 7 | 57,14 |
| | | 2016 | 3 | 7 | 42,86 |
| 7 | BMRI | 2014 | 4 | 7 | 57,14 |
| | | 2015 | 4 | 8 | 50,00 |
| | | 2016 | 4 | 8 | 50,00 |
| 8 | PTBA | 2014 | 2 | 6 | 33,33 |
| | | 2015 | 2 | 6 | 33,33 |
| | | 2016 | 2 | 6 | 33,33 |
| 9 | TINS | 2014 | 2 | 5 | 40,00 |
| | | 2015 | 3 | 6 | 50,00 |
| | | 2016 | 3 | 6 | 50,00 |
| 10 | SMGR | 2014 | 3 | 7 | 42,86 |
| | | 2015 | 3 | 7 | 42,86 |
| | | 2016 | 2 | 7 | 28,57 |
| 11 | JSMR | 2014 | 2 | 6 | 33,33 |
| | | 2015 | 2 | 6 | 33,33 |

| NO | KODE PERUSAHAAN | TAHUN | Jumlah Dewan Komisaris Independen | Jumlah Dewan Komisaris | Proporsi Dewan Komisaris Independen (%) |
|-----------|------------------------|--------------|--|-------------------------------|--|
| | | 2016 | 2 | 6 | 33,33 |
| 12 | TLKM | 2014 | 3 | 7 | 42,86 |
| | | 2015 | 3 | 7 | 42,86 |
| | | 2016 | 3 | 7 | 42,86 |



Lampiran 3 Jumlah Dewan Direksi Perusahaan Sampel Tahun 2014-2016

| NO | KODE PERUSAHAAN | TAHUN | Jumlah Dewan Direksi | Ln Jumlah Dewan Direksi |
|----|-----------------|-------|----------------------|-------------------------|
| 1 | ADHI | 2014 | 6 | 1,79 |
| | | 2015 | 6 | 1,79 |
| | | 2016 | 6 | 1,79 |
| 2 | PTPP | 2014 | 6 | 2,30 |
| | | 2015 | 6 | 2,40 |
| | | 2016 | 6 | 1,79 |
| 3 | WIKA | 2014 | 6 | 2,40 |
| | | 2015 | 7 | 1,79 |
| | | 2016 | 6 | 1,79 |
| 4 | BBNI | 2014 | 10 | 1,95 |
| | | 2015 | 9 | 1,61 |
| | | 2016 | 10 | 2,08 |
| 5 | BBRI | 2014 | 11 | 1,79 |
| | | 2015 | 11 | 1,79 |
| | | 2016 | 11 | 1,95 |
| 6 | BBTN | 2014 | 6 | 2,20 |
| | | 2015 | 8 | 2,40 |
| | | 2016 | 8 | 2,08 |
| 7 | BMRI | 2014 | 11 | 2,40 |
| | | 2015 | 11 | 1,79 |
| | | 2016 | 10 | 1,79 |
| 8 | PTBA | 2014 | 6 | 1,95 |
| | | 2015 | 6 | 1,79 |
| | | 2016 | 6 | 2,08 |
| 9 | TINS | 2014 | 6 | 1,79 |
| | | 2015 | 6 | 1,79 |
| | | 2016 | 4 | 1,79 |
| 10 | SMGR | 2014 | 7 | 2,30 |
| | | 2015 | 7 | 2,40 |
| | | 2016 | 7 | 2,08 |
| 11 | JSMR | 2014 | 5 | 2,30 |
| | | 2015 | 6 | 1,79 |
| | | 2016 | 6 | 1,39 |
| 12 | TLKM | 2014 | 8 | 1,95 |

| NO | KODE PERUSAHAAN | TAHUN | Jumlah Dewan Direksi | Ln Jumlah Dewan Direksi |
|-----------|------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | 2015 | 8 | 1,79 |
| | | 2016 | 9 | 2,20 |



Lampiran 4 Jumlah Komite Audit Perusahaan Sampel Tahun 2014-2016

| NO | KODE PERUSAHAAN | TAHUN | Jumlah Komite Audit | Ln Jumlah Komite Audit |
|----|-----------------|-------|---------------------|------------------------|
| 1 | ADHI | 2014 | 3 | 0,69 |
| | | 2015 | 3 | 1,39 |
| | | 2016 | 5 | 1,79 |
| 2 | PTPP | 2014 | 4 | 1,10 |
| | | 2015 | 3 | 1,79 |
| | | 2016 | 3 | 1,39 |
| 3 | WIKA | 2014 | 6 | 1,79 |
| | | 2015 | 6 | 1,39 |
| | | 2016 | 4 | 1,39 |
| 4 | BBNI | 2014 | 3 | 1,61 |
| | | 2015 | 5 | 1,10 |
| | | 2016 | 3 | 1,61 |
| 5 | BBRI | 2014 | 6 | 1,10 |
| | | 2015 | 6 | 1,10 |
| | | 2016 | 6 | 1,79 |
| 6 | BBTN | 2014 | 4 | 1,61 |
| | | 2015 | 3 | 1,79 |
| | | 2016 | 3 | 1,10 |
| 7 | BMRI | 2014 | 6 | 1,61 |
| | | 2015 | 5 | 1,39 |
| | | 2016 | 6 | 1,39 |
| 8 | PTBA | 2014 | 4 | 1,39 |
| | | 2015 | 4 | 1,10 |
| | | 2016 | 3 | 1,39 |
| 9 | TINS | 2014 | 4 | 1,61 |
| | | 2015 | 4 | 1,10 |
| | | 2016 | 5 | 1,39 |
| 10 | SMGR | 2014 | 5 | 1,10 |
| | | 2015 | 4 | 1,79 |
| | | 2016 | 4 | 1,10 |
| 11 | JSMR | 2014 | 3 | 1,79 |
| | | 2015 | 3 | 1,10 |
| | | 2016 | 3 | 1,61 |
| 12 | TLKM | 2014 | 5 | 1,39 |

| NO | KODE PERUSAHAAN | TAHUN | Jumlah Komite Audit | Ln Jumlah Komite Audit |
|----|-----------------|-------|---------------------|------------------------|
| | | 2015 | 4 | 1,10 |
| | | 2016 | 6 | 1,79 |



Lampiran 5 Data *Input IBM SPSS Versi 23.00 for Windows*

| No. | X _{KI} | X _{DKI} | X _{DD} | X _{KA} | Y _{ROA} | Y _{ROE} |
|-----|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1 | 83,99 | 33,33 | 6 | 3 | 5,68 | 18,65 |
| 2 | 97,07 | 40,00 | 6 | 4 | 6,32 | 22,87 |
| 3 | 93,49 | 40,00 | 6 | 6 | 5,36 | 15,25 |
| 4 | 98,81 | 50,00 | 10 | 3 | 3,25 | 17,75 |
| 5 | 98,02 | 62,50 | 11 | 6 | 3,84 | 24,80 |
| 6 | 95,01 | 50,00 | 6 | 4 | 1,09 | 9,35 |
| 7 | 99,14 | 57,14 | 11 | 6 | 3,04 | 19,70 |
| 8 | 97,79 | 33,33 | 6 | 4 | 16,24 | 21,86 |
| 9 | 91,44 | 40,00 | 6 | 4 | 10,41 | 14,96 |
| 10 | 99,33 | 42,86 | 7 | 5 | 20,80 | 22,27 |
| 11 | 98,92 | 33,33 | 5 | 3 | 5,81 | 11,22 |
| 12 | 99,49 | 42,86 | 8 | 5 | 20,30 | 31,41 |
| 13 | 86,30 | 33,33 | 6 | 3 | 4,45 | 9,01 |
| 14 | 97,77 | 33,33 | 6 | 3 | 6,72 | 16,42 |
| 15 | 95,53 | 42,86 | 7 | 6 | 3,83 | 12,93 |
| 16 | 98,21 | 66,67 | 9 | 5 | 2,25 | 11,65 |
| 17 | 98,94 | 62,50 | 11 | 6 | 3,70 | 22,46 |
| 18 | 96,08 | 57,14 | 8 | 3 | 1,48 | 13,35 |
| 19 | 98,87 | 50,00 | 11 | 5 | 2,90 | 17,70 |
| 20 | 96,22 | 33,33 | 6 | 4 | 15,77 | 21,93 |
| 21 | 89,28 | 50,00 | 6 | 4 | 1,81 | 1,89 |
| 22 | 98,50 | 42,86 | 7 | 4 | 15,58 | 16,49 |
| 23 | 98,46 | 33,33 | 6 | 3 | 5,63 | 10,67 |
| 24 | 99,60 | 42,86 | 8 | 4 | 18,86 | 31,03 |
| 25 | 82,20 | 33,33 | 6 | 5 | 3,05 | 5,79 |
| 26 | 95,93 | 33,33 | 6 | 3 | 5,45 | 10,67 |
| 27 | 95,07 | 50,00 | 6 | 4 | 3,96 | 9,18 |
| 28 | 98,10 | 62,50 | 10 | 3 | 2,37 | 12,78 |
| 29 | 98,87 | 55,56 | 11 | 6 | 3,39 | 17,86 |
| 30 | 96,27 | 42,86 | 8 | 3 | 1,55 | 13,69 |
| 31 | 99,10 | 50,00 | 10 | 6 | 1,79 | 9,55 |
| 32 | 97,82 | 33,33 | 6 | 3 | 14,52 | 19,18 |
| 33 | 82,87 | 50,00 | 4 | 5 | 4,35 | 5,01 |
| 34 | 98,04 | 28,57 | 7 | 4 | 16,15 | 14,83 |
| 35 | 94,28 | 33,33 | 6 | 3 | 16,22 | 11,04 |
| 36 | 99,43 | 42,86 | 9 | 6 | 21,26 | 34,57 |

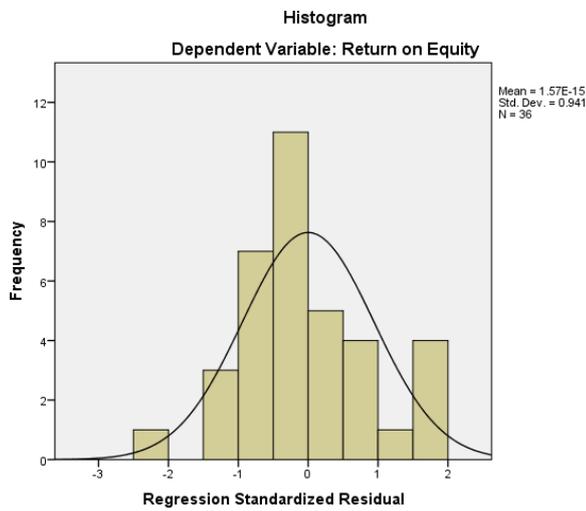
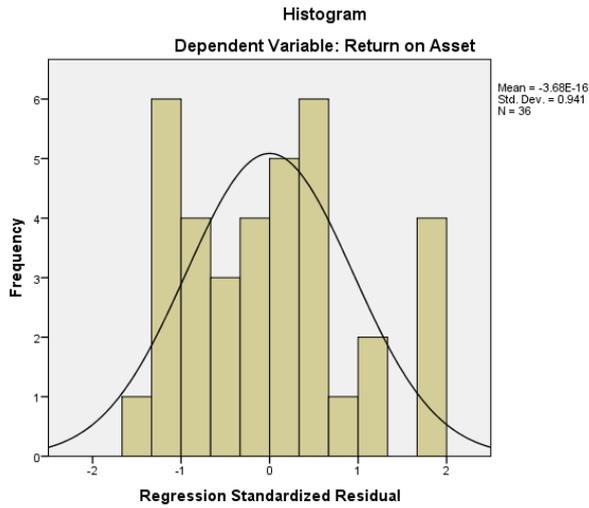
Lampiran 6 Standarisasi Data *Input* IBM SPSS Versi 23.00 for Windows

| No. | X _{KI} | X _{DKI} | X _{DD} | X _{KA} | Y _{ROA} | Y _{ROE} |
|-----|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1 | 83,99 | 33,33 | 1,79 | 0,69 | 5,68 | 18,65 |
| 2 | 97,07 | 40,00 | 1,79 | 1,39 | 6,32 | 22,87 |
| 3 | 93,49 | 40,00 | 1,79 | 1,79 | 5,36 | 15,25 |
| 4 | 98,81 | 50,00 | 2,30 | 1,10 | 3,25 | 17,75 |
| 5 | 98,02 | 62,50 | 2,40 | 1,79 | 3,84 | 24,80 |
| 6 | 95,01 | 50,00 | 1,79 | 1,39 | 1,09 | 9,35 |
| 7 | 99,14 | 57,14 | 2,40 | 1,79 | 3,04 | 19,70 |
| 8 | 97,79 | 33,33 | 1,79 | 1,39 | 16,24 | 21,86 |
| 9 | 91,44 | 40,00 | 1,79 | 1,39 | 10,41 | 14,96 |
| 10 | 99,33 | 42,86 | 1,95 | 1,61 | 20,80 | 22,27 |
| 11 | 98,92 | 33,33 | 1,61 | 1,10 | 5,81 | 11,22 |
| 12 | 99,49 | 42,86 | 2,08 | 1,61 | 20,30 | 31,41 |
| 13 | 86,30 | 33,33 | 1,79 | 1,10 | 4,45 | 9,01 |
| 14 | 97,77 | 33,33 | 1,79 | 1,10 | 6,72 | 16,42 |
| 15 | 95,53 | 42,86 | 1,95 | 1,79 | 3,83 | 12,93 |
| 16 | 98,21 | 66,67 | 2,20 | 1,61 | 2,25 | 11,65 |
| 17 | 98,94 | 62,50 | 2,40 | 1,79 | 3,70 | 22,46 |
| 18 | 96,08 | 57,14 | 2,08 | 1,10 | 1,48 | 13,35 |
| 19 | 98,87 | 50,00 | 2,40 | 1,61 | 2,90 | 17,70 |
| 20 | 96,22 | 33,33 | 1,79 | 1,39 | 15,77 | 21,93 |
| 21 | 89,28 | 50,00 | 1,79 | 1,39 | 1,81 | 1,89 |
| 22 | 98,50 | 42,86 | 1,95 | 1,39 | 15,58 | 16,49 |
| 23 | 98,46 | 33,33 | 1,79 | 1,10 | 5,63 | 10,67 |
| 24 | 99,60 | 42,86 | 2,08 | 1,39 | 18,86 | 31,03 |
| 25 | 82,20 | 33,33 | 1,79 | 1,61 | 3,05 | 5,79 |
| 26 | 95,93 | 33,33 | 1,79 | 1,10 | 5,45 | 10,67 |
| 27 | 95,07 | 50,00 | 1,79 | 1,39 | 3,96 | 9,18 |
| 28 | 98,10 | 62,50 | 2,30 | 1,10 | 2,37 | 12,78 |
| 29 | 98,87 | 55,56 | 2,40 | 1,79 | 3,39 | 17,86 |
| 30 | 96,27 | 42,86 | 2,08 | 1,10 | 1,55 | 13,69 |
| 31 | 99,10 | 50,00 | 2,30 | 1,79 | 1,79 | 9,55 |
| 32 | 97,82 | 33,33 | 1,79 | 1,10 | 14,52 | 19,18 |
| 33 | 82,87 | 50,00 | 1,39 | 1,61 | 4,35 | 5,01 |
| 34 | 98,04 | 28,57 | 1,95 | 1,39 | 16,15 | 14,83 |
| 35 | 94,28 | 33,33 | 1,79 | 1,10 | 16,22 | 11,04 |
| 36 | 99,43 | 42,86 | 2,20 | 1,79 | 21,26 | 34,57 |

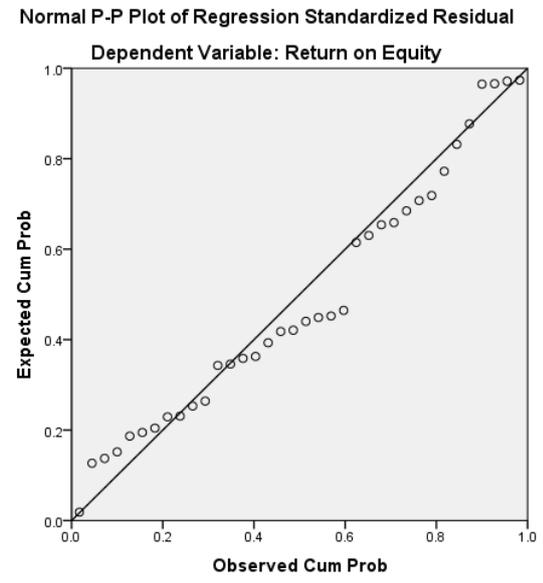
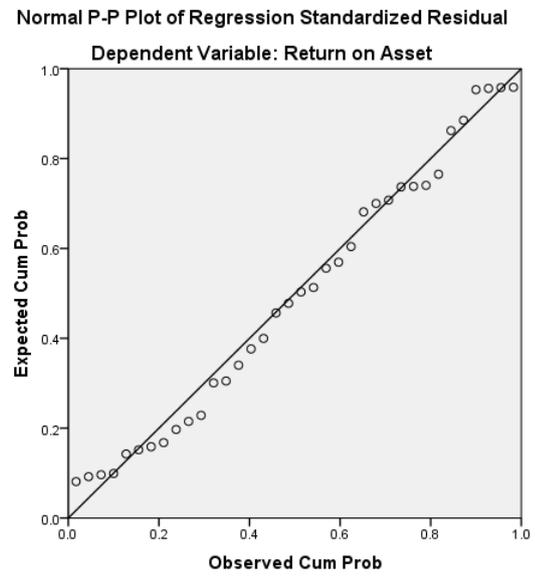
Lampiran 7 Hasil Output IBM SPSS Versi 23.00 for Windows

1. Uji Normalitas

a. Histogram



b. Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



c. Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| N | | 36 | 36 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 | ,0000000 |
| | Std. Deviation | 4,95309159 | 5,67610679 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,110 | ,144 |
| | Positive | ,110 | ,144 |
| | Negative | -,074 | -,083 |
| Test Statistic | | ,110 | ,144 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,200 ^{c,d} | ,066 ^c |

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

| Model | | Collinearity Statistics | |
|-------|----------------------------|-------------------------|-------|
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | Kepemilikan Institusional | ,649 | 1,542 |
| | Dewan Komisaris Independen | ,493 | 2,030 |
| | Dewan Direksi | ,373 | 2,682 |
| | Komite Audit | ,773 | 1,293 |
| | | | |

a. Dependent Variable: Return on Asset

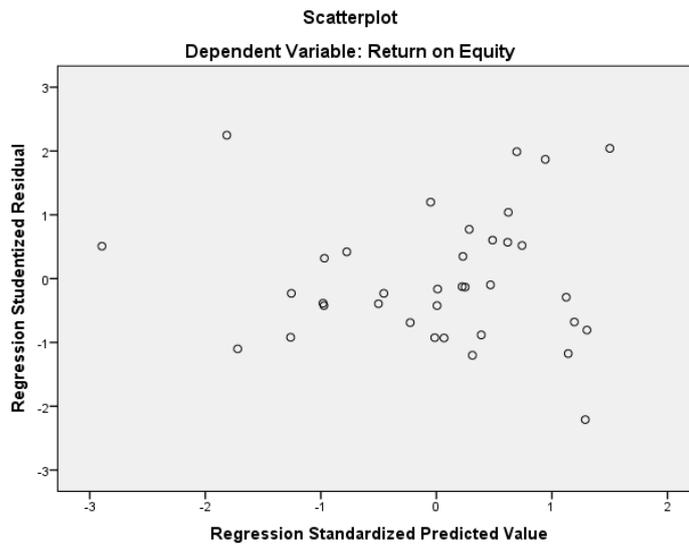
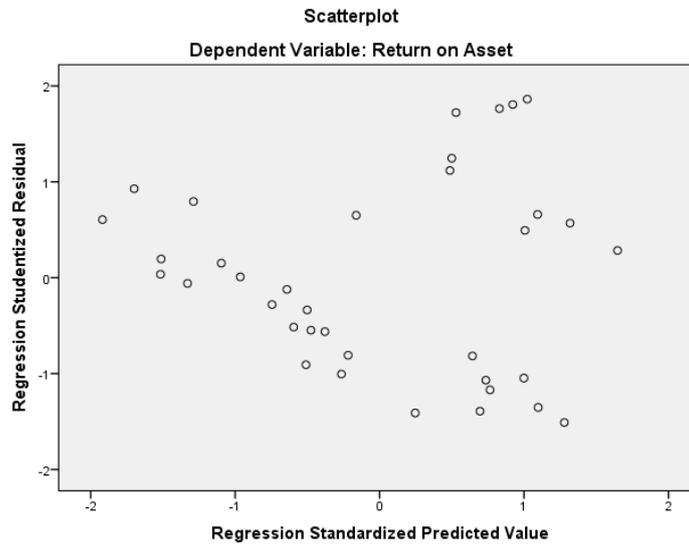


Coefficients^a

| Model | | Collinearity Statistics | |
|-------|----------------------------|-------------------------|-------|
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | Kepemilikan Instusional | ,649 | 1,542 |
| | Dewan Komisaris Independen | ,493 | 2,030 |
| | Dewan Direksi | ,373 | 2,682 |
| | Komite Audit | ,773 | 1,293 |

a. Dependent Variable: Return on Equity

3. Uji Heteroskedastisitas



4. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | ,653 ^a | ,426 | ,352 | 5,26295 | 2,049 |

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi

b. Dependent Variable: Return on Asset

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | ,634 ^a | ,403 | ,325 | 6,03120 | 2,048 |

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi

b. Dependent Variable: Return on Equity

5. Analisis regresi linear berganda

| Variabel | Standardized Coefficients Beta | T | Sig. |
|-----------------------------|--------------------------------|--------|-------|
| Kepemilikan Institusional | 0,417 | 2,470 | 0,019 |
| Dewan Komisaris Independen | -0,633 | -3,263 | 0,003 |
| Dewan Direksi | -0,071 | -0,320 | 0,751 |
| Komite Audit | 0,255 | 1,645 | 0,110 |
| R ² : 0,426 | | | |
| Adj. R ² : 0,352 | | | |
| N : 36 | | | |

| Variabel | Standardized Coefficients Beta | T | Sig. |
|-----------------------------|--------------------------------|--------|-------|
| Kepemilikan Institusional | 0,359 | 2,083 | 0,046 |
| Dewan Komisaris Independen | -0,434 | -2,194 | 0,036 |
| Dewan Direksi | 0,427 | 1,880 | 0,070 |
| Komite Audit | 0,181 | 1,150 | 0,259 |
| R ² : 0,403 | | | |
| Adj. R ² : 0,325 | | | |
| N : 36 | | | |

6. Uji t

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -33,056 | 18,252 | | -1,811 | ,080 |
| | Kepemilikan Institusional | ,562 | ,228 | ,417 | 2,470 | ,019 |
| | Dewan Komisaris Independen | -,396 | ,121 | -,633 | -3,263 | ,003 |
| | Dewan Direksi | -1,785 | 5,574 | -,071 | -,320 | ,751 |
| | Komite Audit | 5,709 | 3,470 | ,255 | 1,645 | ,110 |

a. Dependent Variable: Return on Asset

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -52,537 | 20,916 | | -2,512 | ,017 |
| | Kepemilikan Institusional | ,543 | ,261 | ,359 | 2,083 | ,046 |
| | Dewan Komisaris Independen | -,305 | ,139 | -,434 | -2,194 | ,036 |
| | Dewan Direksi | 12,006 | 6,388 | ,427 | 1,880 | ,070 |
| | Komite Audit | 4,573 | 3,976 | ,181 | 1,150 | ,259 |

a. Dependent Variable: Return on Equity

7. Uji F

ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1 | Regression | 637,702 | 4 | 159,426 | 5,756 | ,001 ^b |
| | Residual | 858,659 | 31 | 27,699 | | |
| | Total | 1496,361 | 35 | | | |

a. Dependent Variable: Return on Asset

b. Predictors: (Constant) Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit.

ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1 | Regression | 759,691 | 4 | 189,923 | 5,221 | ,002 ^b |
| | Residual | 1127,637 | 31 | 36,375 | | |
| | Total | 1887,327 | 35 | | | |

a. Dependent Variable: Return on Equity

b. Predictors: (Constant) Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit.

8. Model Summary

Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .653 ^a | .426 | .352 | 5.26295 |

a. Dependent Variable: Return on Asset

b. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi

Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .634 ^a | .403 | .325 | 6.03120 |

a. Dependent Variable: Return on Equity

b. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi